Siti Solechah

PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH

Perspektif Pekerjaan Sosial

PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH

Perspektif Pekerjaan Sosial

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH

Perspektif Pekerjaan Sosial

Siti Solechah

Penanganan Anak Putus Sekolah (Perspektif Pekerjaan Sosial)
© Siti Solechah

viii + 94 halaman; 15.5 x 23 cm.
ISBN: 978-623-261-125-2

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, November 2020.

Penulis : Siti Solechah
Editor : Viana
Sampul : Fendi
Layout : Chairi

Diterbitkan oleh:
Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)
Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30
Banguntapan Bantul DI Yogyakarta
Email: admin@samudrabiru.co.id
Website: www.samudrabiru.co.id
WA/Call: 0812-2607-5872

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya buku *Penanganan Anak Putus Sekolah: Perspektif Pekerjaan Sosial* ini dapat diselesaikan. Pendidikan sebagai penentu kualitas suatu bangsa tidak bisa dibantahkan. Pendidikan bahkan menjadi salah satu parameter pembangunan manusia yang dikenal sebagai indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI).

Banyak kalangan mengeluhkan tentang kondisi pendidikan di Indonesia, karena memang kondisinya masih memprihatinkan. Akses pendidikan di berbagai daerah masih sangat terbatas, bahkan di daerah-daerah yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan yang memadai seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam buku ini.

Akhir kata, terselesaikannya buku ini tidak terlepas dari bantuan, saran, motivasi, serta dukungan yang kuat dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyadari tidak ada satu buku pun yang sempurna tanpa ada kekurangan, termasuk buku ini. Karenanya pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar ke depannya menjadi semakin baik dan bermanfaat. *Aamiin...*

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I

PENDAHULUAN **1**

A. Krisis Akses Pendidikan 1

B. Anak Putus Sekolah 6

C. Model Kajian Anak Putus Sekolah 7

D. Proses Penulisan 9

BAB II

PEKERJAAN SOSIAL

DAN ANAK PUTUS SEKOLAH **11**

A. Mengenal Pekerjaan Sosial 12

B. Memahami Anak Putus Sekolah 16

C. Peran Pekerja Sosial 19

BAB III

PELAYANAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B **23**

A. Pendidikan Kesetaraan 23

B. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Paket B 27

C. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Paket B 27

D. Metode Pembelajaran 28

E. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Paket B 32

BAB IV

SELAYANG PANDANG PKBM DIPONEGORO **35**

A. Kondisi Sosial-Ekonomi Desa Maguwoharjo 35

B. Mengenal PKBM Diponegoro 39

C. Program Kegiatan PKBM Diponegoro 44

BAB V
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH 49
A. Program Paket B untuk Anak Putus Sekolah 50
B. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya.....66
BAB VI
PENUTUP.....83
DAFTAR PUSTAKA..... 89
BIOGRAFI PENULIS 93

BAB I
PENDAHULUAN

A. Krisis Akses Pendidikan

Pendidikan sebagai penentu kualitas suatu bangsa tidak bias dibantahkan. Pendidikan bahkan menjadi salah satu parameter pembangunan manusia yang dikenal sebagai indeks pembangunan manusia (*human development index*/HDI). Sebuah negara bisa dikatakan sejahtera jika memiliki indeks pembangunan manusia yang baik. Sebaliknya, sebuah negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah dapat dikatakan sebagai negara yang kurang sejahtera atau bahkan terbelakang. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Banyak kalangan mengeluhkan tentang kondisi pendidikan di Indonesia, karena memang kondisinya masih memprihatinkan. Akses pendidikan di berbagai daerah masih sangat terbatas, bahkan di daerah-daerah yang seharusnya mendapatkan akses Pendidikan yang memadai, seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam buku ini.

Setengah abad setelah pernyataan umum hak manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) disetujui, pada dasarnya hak memperoleh pelayanan pendidikan sudah diterima dan diakui secara luas di seluruh dunia. Namun, dalam prakteknya, secara subtansial masih terlalu sering dilanggar dan diabaikan.[1]

[1] Roem Topatimasang, dkk, Merubah Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.68.

Termasuk dalam hal ini di Indonesia, di mana masih banyak sekali kelompok masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan secara layak dan memadai. Padahal pendidikan adalah hak seluruh warga tanpa terkecuali, sehingga ketika ada sebagian kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan hak atas pendidikannya maka ini adalah kondisi yang tidak bisa dibiarkan.

Kondisi sebagian warga Indonesia yang kurang mendapatkan akses terhadap Pendidikan diperparah dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kondisi ekonomi yang kurang baik di negara kita ini mengakibatkan masih banyak masyarakat menengah ke bawah yang tidak memperhatikan pendidikan. Krisis ekonomi yang datang bertubi-tubi menghampiri negeri ini masih dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari krisis tersebut yang terkena imbas dampak sangat besar adalah lapisan masyarakat bawah. Semua sektor yang ada, baik itu di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan pendidikan. Sehingga memaksa setiap orang untuk mengatur segala sesuatu yang akan berdampak kurang baik.

Ketika negara-negara berkembang mengedepankan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kemakmuran ekonomi, kebijaksanaan yang sentralistik dan melupakan aspek-aspek manusia, maka pembangunan justru dehumanisasi. Pada kondisi demikian, lembaga-lembaga kemasyarakatan hadir untuk mengembalikan arah esensial pembangunan yang humanistik, melalui pendidikan produksi dengan upaya transformasi penyadaran diri kepada masyarakat. Rakyat sebagai objek pembangunan diajak bersama untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan.[2]

Sehingga bisa tercapai suatu bentuk masyarakat yang mandiri, yang mempunyai kekuatan sosial dan masyarakat yang

[2] Musa Asy'arie, Pembangunan Masyarakat Islam-Agama, Ekonomi Sosial dan Budaya, dalam jurnal Populis Pembangunan Masyarakat (Yogyakarta: ElSaq Press 2003), hlm. 61.

kreatif. Salah satunya yaitu kekuatan sosial yang cukup untuk mengantarkan masyarakat memiliki daya kreatif sebagai upaya membentuk kemandiriannya adalah optimalisasi pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu modal utama dalam pembangunan. Sangat sulit rasanya untuk mengatakan bahwa kemajuan suatu negara dapat dicapai adanya investasi dalam bidang pendidikan, karena pada dasanya pendidikan adalah sumber daya yang terbesar bagi manusia. Sedangkan fungsi pendidikan sebagai transmisi atau pengalihan kultur dan sebagai pembentuk kepribadian masyarakat.[3]

Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan pemenuhan kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Salah satu indikator yang menentukan rumah tangga termasuk fakir miskin adalah ketidakmampuan rumah tangga membiayai pendidikan dasar bagi anak-anaknya sehingga anak-anaknya mengalami putus sekolah. Kondisi putus sekolah inilah yang menjadi bagian dari krisis pendidikan yang tidak bisa dibiarkan terjadi di bangsa ini.

Putus sekolah memang merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tak pernah berakhir. Masalah ini sulit untuk dipecahkan penyebabnya dan sudah berakar, salah satu penyebabnya karena kondisi ekonomi. Artinya bahwa kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor pendukung yang paling besar kelanjutan pendidikan anak-anak sebab pendidikan membutuhkan dana besar. Hampir setiap tempat banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, atau putus sekolah di tengah jalan disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan.

---

[3] Khairuddin, Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm 103-104.

Mengingat keberadaan masyarakat di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Yogyakarta serta semakin meningkat. Hal ini disebabkan salah satunya adalah akibat krisis yang berkepanjangan, yang berlanjut menjadi krisis multidimensi yang berdampak buruk terhadap status kesejahteraan sosial. Terutama munculnya anak terlantar dan anak putus sekolah di berbagai kota di Indonesia ini. Mereka tidak mampu mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta tidak dapat memperoleh hak-hak kebutuhan dasarnya. Misalnya hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan akibat dari keberadaan orang tua dan keluarga mereka yang mengalami keterpurukan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, menurunnya daya beli dan melambungnya harga-harga.

Salah satu daerah di Yogyakarta yang mengalami krisis terhadap akses pendidikan adalah kabupaten Sleman. Daerah kabupaten Sleman tercatat sebanyak anak yang berusia 7-18 tahun yang masih bersekolah meliputi 48,73 % di tingkat SD/MI, 22,32 % di tingkat SLTP/MTS, 13,38 % di tingkat SMU/SMK/MA dan 15,57 % yang tidak bersekolah pada tahun 2006.[4] Sedangkan pada akhir tahun 2008 Kabupaten Sleman terdapat 7000 masyarakat yang masih buta aksara.[5] Hal ini cukup memprihatinkan, kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa. Untuk anak usia 7-18 tahun yang masih sekolah terutama pada pendidikan dasar diupayakan jangan sampai putus sekolah.

Permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kebijakan di antaranya; memberikan pelayanan terhadap warga yang

[4] Profil Rumah Tangga Fakir-miskin Propinsi Daerah Istimewa (Yogyakarta: PSKK UGM, 2006), hlm. 59-60.

[5] Sambutan Kepala Diknas Kabupaten Sleman pada acara Sosialisasi Program-program PNF tahun 2009 di Pendopo PKBM Sinar Mlati pada tanggal 14 Februari 2009.

putus sekolah agar mereka masih bisa mengenyam pendidikan dasar, memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar yang dapat meningkatkan mutu taraf kehidupannya serta meningkatkan kemandirian masyarakat. Kebijakan pemerintah bahwa masyarakat diharuskan belajar selama sembilan tahun merupakan pendidikan tingkat dasar. Presiden telah mengeluarkan instruksi presiden No. 5 tahun 2006 tertanggal 9 Juni 2006 tentang gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan penuntasan buta aksara.

Dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal. Departemen Pendidikan Nasional melalui program pendidikan kesetaraan yaitu program paket B. Program paket B sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak dapat melanjutkan atau telah putus/DO sekolah lanjutan tingkat pertama guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang mereka peroleh dari tingkat sekolah dasar.

Tujuan kebijakan ini merupakan strategis untuk mengatasi masalah: *pertama*, membantu siswa putus sekolah, sebab masih banyak masyarakat terutama kalangan yang kurang mampu yang tidak bisa mengenyam pendidikan dengan sempurna karena terhambat biaya. *Kedua*, memberikan dorongan wajib belajar dua belas tahun setelah wajib belajar sembilan tahun terlaksana. Dua belas tahun merupakan kebutuhan wajib bagi orang untuk belajar.

Dengan dukungan adanya program wajib belajar sembilan tahun, pemeratan kesempatan belajar bagi warga negara, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, maka mulai tahun 2003 PKBM Diponegoro mengadakan rekrutmen kepada warga masyarakat sekitarnya yang tidak mampu melanjutkan sekolah dasar atau putus sekolah. Kasus putus sekolah ini sebagian besar disebabkan oleh faktor antara lain; a). Faktor

sosial ekonomi orangtua yang sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, b). Faktor anak sendiri karena sesuatu hal tidak mau mengikuti pendidikan di sekolah. PKBM Diponegoro ini memberikan kontribusi positif terhadap krisis akses pendidikan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Anak Putus Sekolah

PKBM Diponegoro merupakan lembaga non-pemerintah yang memiliki visi dan misi pendidikan non formal dan terletak di wilayah desa Maguwoharjo kecamatan Depok Kabupaten Sleman maka lembaga tersebut berperan sebagai pelaksana program kebijakan pemerintah. Namun disadari betul oleh lembaga tersebut bahwa menangani pelayanan pendidikan anak putus sekolah tidaklah semudah membicarakannya tentunya ada hambatan dalam pelaksanaannya.

Buku ini berusaha mengungkap tentang kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan terhadap anak putus sekolah yang dilakukan oleh PKBM Diponegoro yang bertempat di desa Maguwoharjo. Sedangkan fokusnya pada pelaksanaan pelayanan pendidikan dalam menangani anak putus sekolah melalui pelayanan program paket B yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Dari situlah buku ini fokus pada dua permasalahan pokok. *Pertama*, pelaksanaan pelayanan pendidikan anak putus sekolah pada PKBM Diponegoro di Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi oleh PKBM Diponegoro dalam proses pelaksanaan pelayanan pedidikan anak putus sekolah melaiui program paket B di Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta.

Dengan mengungkap dua hal penting ini, diharapkan ada kontribusi dalam penanganan krisis akses pendidikan di bangsa ini. Selain itu, diharapkan buku ini dapat bermanfaat untuk menambah

khasanah ilmu pengetahuan tentang pelayanan pendidikan bagi anak putus sekolah, khususnya pelayanan pendidikan bagi anak putus sekolah melalui program paket B. Selain itu, secara praktis buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para praktisi pelayanan pendidikan khususnya pelayanan terhadap anak putus sekolah.

C. Model Kajian Anak Putus Sekolah

Kajian terhadap anak putus sekolah selama ini di Indonesia sangat beragam. Untuk lebih memahaminya secara utuh akan disajikan beberapa model kajian sebagai acuan perbandingan dalam buku ini. *Pertama*, Amiroellah, dkk.[6] dalam kajiannya yang berjudul *Sebab-sebab Putus Sekolah Di Kalangan Desa Pantai Di Sulawesi Selatan suatu Studi kasus pada Desa Lalang Panua Kab. Barru Selewesi Selatan*. Kajian ini ingin melacak berbagai faktor penyebab anak putus sekolah terutama di kalangan masyarakat desa petani di Sulawesi Selatan. Di samping itu berusaha mengetahui faktor sebab penyebab manakah di antara sekian banyak penyebab yang paling berpengaruh terhadap masalah anak putus sekolah.

Hasil kajian ini menyebutkan faktor penyebab anak putus sekolah yaitu disebabkan karena faktor sosial-ekonomi, yang menyangkut biaya pendidikan, mata pencaharian orang tua murid sebagai tenaga kerja pembantu dan faktor non sosial-ekonomi, sikap orangtua terhadap pendidikan yang kurang mendukung, keadaan kondisi kesehatan murid dan pengaruh adat istiadat.

Kedua, Syahruddin, dkk., dalam bukunya yang berjudul *Anak Perempuan Umur 7-15 Tahun Yang Tidak Sekolah dan Putus Sekolah di Sumatera*. Buku ini membahas jumlah penduduk wanita umur 7-15 tahun yang tidak sekolah dan putus sekolah. Faktor sosial ekonomi

[6] Amiroellah, dkk., Sebab-Sebab Putus Sekolah Dikalangan Desa Pantai Di Sulawesi Selatan Suatu Studi Kasus pada Desa Lalang Panua Kab. Barru: Selewesi Selatan, (Yogyakarta: UGM). Hlm. 1-10.

berpengaruh penting bagi seseorang anak perempuan untuk tidak bersekolah. Semakin tinggi kondisi sosial ekonomi sebuah rumah tangga semakin kecil kemungkinan anak perempuannya tidak bersekolah dan sebaliknya.[7]

Lebih lanjut Syahruddin, dkk. dari hasil kajiannya mengungkapkan alasan bekerja nampaknya merupakan faktor penting yang menyebabkan mereka tidak sekolah. Alasan bekerja ini jauh lebih kurang penting dibandingkan dengan alasan lainnya seperti letak sekolah, tidak diterima, berumah tangga dan sebagainya. Seorang anak perempuan terpaksa tinggal dirumah untuk melakukan sebagian kegiatan rumah tangga seperti menjaga adik-adiknya, memasak dan sebagainya. Sementara ibunya bekerja diluar rumah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengaruh ibu bekerja terhadap anak perempuan bersekolah adalah negatif.

Ketiga, Nasir, dalam kajian yang berjudul *Anak Putus Sekolah dan Cara Pembinaannya Di Kecamatan Jangka Kabupaten Bireun*. Tujuan dari kajian ini adalah menemukan jawaban dari permasalahan anak putus sekolah yaitu untuk mengetahui beberapa banyak anak putus sekolah di Kecamatan Jangka, faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, sikap orangtua, serta bagaimana cara pembinaan terhadap anak yang putus sekolah.[8] Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab anak putus sekolah di Kecamatan Jangka. Secara umum masalah utamanya adaiah kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung. Sebagian lagi faktor keluarga yang menyebabkan anak-anak di Kecamatan Jangka putus sekolah.

Adapun orangtua dan masyarakat dalam menghadapi anak putus sekolah ada dua upaya pencegahan dan pembinaan. Upaya

[7] Syahruddin, dkk., Anak Perempuan Umur 7-15 Tahun Yang Tidak Sekolah dan Putus Sekolah Di Sumatra., (Yogyakarta: PSKK UGM, 1999), hlm. 1.

[8] Nasir, Anak Putus Sekolah Dan Cara Pembinaannya Di Kecamatan Jangka Kabupaten Bireun. (Yogyakarta: PSKK UGM, 1999), hlm. 5.

pencegahan dilakukan sebelum putus sekolah dan menyadarkan orangtua akan pentingnya pendidikan demi menjamin masa depan anak serta memberikan motivasi belajar kepada anak. Adanya upaya pembinaan yang dilakukan adalah dengan mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan kepada anak. Serta memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya supaya anak disibukkan serta dapat menghindarinya dari pikiran yang menyimpang.

Berdasarkan model-model kajian yang sudah ada, buku ini berusaha ingin memotret penanganan anak putus sekolah dari sudut pandang lain. Khususnya tentang pelayanan pendidikan bagi anak putus sekolah melalui program paket B oleh PKBM Diponegoro di desa Maguwoharjo. Sehingga kajian ini diharapkan memiliki perbedaan dengan kajian-kajian lain yang sudah dilakukan.

D. Proses Penulisan

Sebuah buku memiliki proses yang panjang untuk mendapatkan pembahasan yang panjang dan sistematis. Mulai dengan dari mana data diperoleh, siapa saja yang menjadi subjek pembahasan dalam buku ini, bagaimana data diolah, menjadi bagian dari proses penulisan yang tidak bisa diabaikan untuk dibahas dalam buku ini. Sehingga buku ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun sosial. Secara akademik, buku ini dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Sedangkan secara sosial buku ini ini dapat membumi karena berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Buku ini menggambarkan secara verbal bagaimana pelayanan anak putus sekolah melalui program paket B dijalankan di PKBM Diponegoro. Karena itu, kajian dalam buku ini merupakan kajian yang bersifat kualitatif dan berbentuk *case study* (study kasus).

Kajian yang bersifat kualitatif ditujukan untuk memperoleh penghayatan, pengalaman, persepsi dari para pelaku program paket B.

Dalam kajian yang bersifat kualitatif, data yang digunakan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, meskipun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang.[9] Sedangkan data verbal yang menjadi bahan penting dalam buku ini berupa hasil wawancara, catatan di lapangan, foto-foto, dokumen pribadi dan catatan lainnya. Data verbal ini diperoleh dari subjek kajian di antaranya: para pimpinan PKBM Diponegoro, pengurus atau pengelola paket B PKBM Diponegoro dan masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta peket B. Seluruh data ini berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pendidikan anak putus sekolah di desa Maguwoharjo melalui program paket B yang dilaksanakan oleh PKBM Diponegoro Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta.

[9] Sudarman Danim, Menjadi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 61.

BAB II
PEKERJAAN SOSIAL
DAN ANAK PUTUS SEKOLAH

Salah satu profesi mulia di muka bumi ini adalah pekerja sosial. Kenapa mulia? Sebab profesi ini tugasnya adalah menolong orang. Ada kredo umum dikenal dalam bidang pekerjaan sosial yakni help *people to help themselves* (menolong orang agar menolong dirinya sendiri). Meskipun tujuan utamanya adalah agar orang yang ditolong mampu berdaya dan mandiri, namun awal mulanya adalah ditolong oleh pekerja sosial. Inilah kenapa pekerja sosial adalah profesi yang sangat mulia.

Sayangnya, profesi pekerja sosial di Indonesia kurang mendapatkan tempat yang layak di hati masyarakat Indonesia. Sebagaimana dokter, perawat, insinyur, psikolog, guru atau profesi yang lebih jelas lainnya, pekerja sosial justru kurang dikenal. Pekerja sosial masih dianggap sebagai profesi sampingan yang bisa dilakukan siapa saja. Bahkan kesannya pekerja sosial adalah profesi yang bisa dilakukan siapa saja karena identik dengan profesi sukarelawan yang tidak membutuhkan ilmu khusus.

Padahal pekerja sosial adalah profesi yang setara sebagaimana halnya dokter, perawat, psikolog atau profesi lainnya. Sebab, seperti dokter yang harus kuliah di kedokteran, pekerja sosial juga memiliki pendidikan khusus yakni pendidikan di jurusan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Sehingga di sini dapat dikatakan

bahwa pekerja sosial adalah profesi yang profesional sebagaimana profesi lainnya.'

Fokus pekerjaan sosial adalah membantu orang atau masyarakat yang memiliki masalah di bidang sosial, termasuk dalam hal ini adalah masalah pendidikan. Di samping seorang guru, masalah pendidikan termasuk di dalamnya anak putus sekolah, adalah menjadi tugas seorang pekerja sosial. Dengan kata lain, hal ini dapat dikatakan bahwa pekerja sosial beririsan dengan guru ketika menangani masalah anak putus sekolah. Bab ini akan mengungkapkan bagaimana pekerjaan sosial dalam hubungannya dengan masalah sosial anak putus sekolah.

A. Mengenal Pekerjaan Sosial

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan (*end*) dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.[1] Kesejahteraan sosial (*Social Welfare*) mempunyai dua makna, pertama sebagai tujuan dari pekerjaan pekerja sosial atau kondisi masyarakat yang sejahtera. Kedua diartikan sebagai bidang atau area utama seorang pekerja sosial untuk berkiprah.

Secara umum, untuk mengatasi masalah sosial profesi pekerja sosial mempunyai metode penyembuhan sosial (*social treatment*) yang terdiri dari pendekatan mikro/psikologi praktis dan pendekatan makro/sosiologi praktis. Pendekatan mikro

[1] Zulkifli Lessy, Model-model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Jurusan PMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kerjasama dengan IISEP-CIDA), hlm. 34.

dibagi ke dalam dua metode utama, yaitu terapi perorangan (*casework*), dan terapi kelompok (*groupwork*). Pada pendekatan makro dibagi kedalam tiga metode utama, yaitu pengembangan masyarakat (*community development*) atau sering juga disebut dengan terapi masyarakat (*community work*), manajemen pelayanan kemanusiaan atau disebut dengan terapi kelembagaan (institutional therapy), dan analisa kebijakan sosial (*social polecy*).[2] Dengan demikian, pelayanan pendidikan anak putus sekolah merupakan permasalahan sosial dalam kontek kesejahteraan sosial maka pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan secara makro/sosiologi praktis.

Dalam proses pendampingan sosial, pekerja sosial dapat menjalankan peran sebagai broker (perantara), advokat dan pendidik.

1. Sebagai Broker

Pekerja sosial dapat berperan sebagai broket (perantara) yang menghubungkan seseorang (klien) dengan sistem sumber yang dibutuhkan. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua klien mengetahui ke sumber pelayanan sosial mana dia harus pergi untuk memenuhi kebutuhannya. Di sinilah peran strategis pekerja sosial sebagai broker.[3]

2. Sebagai Advokat

Peran advokat (pembela) merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembela dapat dibagi dua: pertama advokasi kasus (*case advocacy*) yaitu pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang

---

[2] Pajar Hatma Indra Jaya, Model-model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Jurusan PMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kerjasama dengan IISEP-CIDA), hlm. 58

[3] Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 206.

klien secara individual dan kedua adalah advokasi kausial (*cause advocacy*) yaitu klien yang dibela oleh pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.[4]

3. Sebagai Pendidik

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh klien adalah keterbatasan pengetahuan maupun skill dalam bidang tertentu yang mengakibatkan klien berada dalam status kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantage group*). Pekerja sosial berperan sebagai pendidik untuk menutupi kekurangan klien dalam hal pengetahuan ataupun ketrampilannya. Pekerja sosial bertindak sebagai pendidik sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial klien.[5]

Pembangunan sosial dapat didefinisikan sebagai strategi kolektif dan terencana guna meningkatkan kualitas hidup manusia melalui seperangkat kebijakan sosial yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, jaminan sosial dan penangulanan kemiskinan. Apabila pembangunan sosial lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia dalam arti luas, maka pembangunan sosial memfokuskan perhatiannya pada peningkatan modal manusia (*human capital*) yang diukur melalui dua indikator utama.

Salah satu indikator utama adalah pendidikan (misalnya pelayanan bagi anak putus sekolah/penuntasan wajib belajar sembilan tahun atau angka melek huruf).[6] Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada hakekatnya sangat ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan berkepribadian

---

[4] Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hlm. 102.

[5] Ibid, Pekerjaan Sosial ..... hlm. 206.

[6] Edi Suharto, Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial Konsep dan Strategi, (Jakarta: Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI), hlm.ii.

tentunya akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan berkepribadian pula. Oleh karena itu pendidikan harus menjadi prioritas dalam setiap program pembangunan.[7]

Sementara pendidikan mempunyai dampak terhadap pendapatan dalam jangka panjang, melalui kemampuan baca tulis dan pengetahuan. Peningkatan di dalam sistem pendidikan tidaklah hanya diharapkan untuk berperan secara ekonomis tetapi juga sosial melalui penurunan angka kesuburan, meningkatkan status gizi dan status kesehatan yang pada giliranya berdampak positif terhadap kinerja ekonomi.

Dalam UUD 1945 mengamanatkan pemerataan akses bagi setiap penduduk untuk memperoleh pendidikan sehingga tercapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal yang sama juga tertuang dalam UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam Sistem Pendidikan Nasional dapat dibedakan atas struktur pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan masyarakat dan pendidikan kedinasan.

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan dasar pengembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Pendidikan dasar juga dipersiapkan untuk dapat mengikuti pendidikan menengah. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, dibidang pendidikan telah dicanangkan program wajib belajar (Wajar) pendidikan dasar 9 tahun sejak tahun 1994, Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (SD 6 tahun dan SLTP 3 tahun) merupakan upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan dan peningkatan pendidikan di Indonesia.

[7] Muhsin Kalida, Model Jaringan Kemitraan Taman Bacaan Masyarakat, (Yogyakarta: Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, 2009), hlm. 21.

B. Memahami Anak Putus Sekolah

Pendidikan bagi anak merupakan suatu upaya sadar dalam mengembangkan kepribadian bagi peranannya di masa yang akan datang (UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). GBHN dan UU No.1/1989 menetapkan bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Dalam dimensi kehidupan bernegara, kita semua sudah maklum bahwa anak adalah pewaris masa depan bangsa, yang berarti bahwa kualitas kehidupan bangsa di masa yang akan datang tergantung kepada pewarisnya yaitu anak-anak.[8] Dengan demikian pendidikan bagi anak-anak harus diutamakan, kita semua berusaha agar anak tidak mengalami putus sekolah.

Putus sekolah (dalam bahasa Inggris dikenal dengan Putus sekolah) adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar.[9] Anak putus sekolah adalah semua murid yang meninggalkan sekolah dasar dan terjun di masyarakat sebelum tamat. Dalam hal ini semua murid sekolah dasar yang meninggalkan bangku sekolah sebelum lulus ujian akhir. Murid yang sudah tidak aktif mengikuti pelajaran di salah satu kelas dan tidak sempat menyelesaikan pelajaran disebut murid putus sekolah atau *drop out* disingkat DO. Dengan demikian, anak putus sekolah yang dimaksud dalam penulisan tesis ini adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai.

Salah satu kendala untuk mengentaskan wajib belajar sembilan tahun pada skala nasional banyaknya anak yang mengalami putus sekolah. Menurut Yulaelawati,[10] anak yang

[8] Mohammad Surya, Bina Keluarga, (Semarang: Aneka Ilmu, Anggota IKAPI, 2001), hlm. 22-29.

[9] http://skripsi-ilmiah.blogspot.com/2009/O4/anak-putus-sekolah.

[10] Ella Yulaelawati, dkk. Acuan Proses Pelaksanaan Dan Pembelajaran Pendidikan

mengalami putus sekolah disebabkan karena beberapa faktor, antara lain: faktor ekonomi, faktor waktu, faktor geografis, serta faktor sosial/hukum. Selanjutnya keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Pertumbuhan sektor industri yang pesat, tetapi hanya terkonsentrasi di beberapa pusat pertunbuhan saja, pelan namun pasti telah menyebabkan timbulnya ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat desa.[11]

Menurut pendapat Ellis bahwa ekonomi merupakan salah satu dimensi kemiskinan. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.[12]

Hal ini sering dilakukan dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Contoh pengukuran kemiskinan absolut yang digunakan oleh BPS adalah sebesar 2,100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-materi yang diterima seseorang, seperti penduduk miskin dari

---

Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional, 2006), hlm. 9-14.

[11] Bagong Suyanto, Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan "Kumpulan Hasil Penelitian", (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm.xi-xv.

[12] Ibid, Edi Suharto, Membangun ...., hlm. 133.

kalangan nelayan, petani, penduduk kumuh dan miskin perkotaan, Pekerjaan Rumah Tangga (PRT) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Menurut BPS dan Depsos (2002), bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.[13]

Namun demikian, faktor ekonomi yang dimaksudkan adalah ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu. Secara luas kemiskinan kerap penduduk dalam kehidupannya mengalami serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang memburuk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Faktor Waktu

Penyebab putus sekolah tidak hanya karena faktor ekonomi akan tetapi faktor waktu menjadi sebab anak putus sekolah, seperti tidak memiliki biaya atau anak harus bekerja membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Penduduk yang harus bekerja untuk membantu orang tuanya untuk mencari nafkah mereka tidak banyak memiliki waktu untuk belajar. Mereka adalah penduduk yang memiliki karakteristik antara lain:

a. Menghabiskan waktu mereka untuk bekerja,
b. Motivasi belajar rendah, prioritas hidupnya adalah bekerja untuk mencari nafkah,
c. Mereka dibebani tanggungjawab membantu ekonomi keluarga,

[13] Ibid, Edi Suharto, Membangun..., hlm. 134.

d. Kemampuan konsentrasi belajar rendah. Dengan demikian waktu merupakan pendukung anak dalam pendidikan

3. Faktor Geografis

Faktor geografis yaitu penduduk terkendala oleh geografis. Mereka adalah etnik minoritas, suku terasing dan terisolir, yang terkonsentrasi di; a). kawasan pembatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia, b). daerah pulau-pulau terpencil, dan c). daerah-daerah tertinggal di 199 Kabupaten sesuai dengan Kep. Menneg. Pembangunan Daerah tertinggal No_001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang strategi Nasional Pembangunan daerah tertinggal.

4. Faktor Sosial/Hukum

Faktor sosial/hukum yaitu penduduk yang bermasalah sosial/hukum seperti anak jalanan, anak lapas, korban napza, anak yang mengalami kecacatan, IQ yang rendah, rendah diri, dan umur yang melampaui usia sekolah. Begitu juga untuk kategori anak tidak sekolah sama sekali, faktor penyebabnya adalah karena faktor ekonomi di samping faktor sarana, minat yang kurang, perhatian orang tua yang rendah, dan fasilitas yang kurang. Sebagian kecil anak yang tidak sama sekali disebabkan karena cacat fisik.

C. Peran Pekerja Sosial

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, peran pekerja sosial adalah sebagai broker, advokat maupun sebagai pendidik. Dalam hal ini peran pekerja sosial dalam masalah anak putus sekolah ini adalah sebagai pendidik. Yakni sebagai pihak yang memberikan kontribusi skill terhadap anak yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan tersebut. Meskipun demikian, pekerja sosial dapat juga berperan sebagai broker maupun advokat. Sebagai broker pekerja

sosial dapat menghubungkan kepada peluang-peluang sosial maupun ekonomi kepada anak putus sekolah.

Sebagai advokat, pekerja sosial juga bisa berperan memberikan pembelaan terhadap hak-hak sosial maupun ekonomi agar hak tersebut dapat ditunaikan. Memberikan layanan pendidikan adalah termasuk dari hak yang harus didapatkan oleh anak-anak putus sekolah. Apalagi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera pada seorang anak, dibutuhkan pendidikan yang memadai. Sehingga ketika seorang anak tersebut tumbuh dewasa maka dapat lebih mudah untuk mendapatkan hak-hak lainnya. Sebab pendidikan adalah pondasi dari kehidupan seseorang, jika pendidikannya baik maka peluang-peluang kehidupannya dapat dimungkinkan baik pula. Inilah pentingnya memberikan pelayanan pendidikan kepada seorang anak.

Namun demikian, pekerja sosial memiliki perbedaan dalam memberikan pelayanannya dibandingkan dengan guru, dalam hal ini pelayanan terhadap pendidikan anak putus sekolah. Peran guru tentu sudah jelas, yakni sebagai pendidik yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik. Namun pekerja sosial memiliki peran yang lebih strategis, misalnya peran sosial dalam mendukung kondisi sosial ekonomi anak didik tersebut.

Seorang anak putus sekolah memiliki permasalahan yang tidak sekedar pendidikan secara formal, yakni anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan secara formal. Namun juga memiliki permasalahan lain, misalnya masalah *broken home*, keterbatasan ekonomi, trauma akibat kekerasan fisik maupun seksual, keterbelakangan mental dan sebagainya. Masalah-masalah sosial tersebut, sudah selayaknya diatasi dengan pendekatan sosial yang di sini diperankan oleh seorang pekerja sosial. Peran ini memang bisa dilakukan oleh seorang guru, akan tetapi dalam dunia

pendidikan, tidak memberikan ilmu bagaimana mengatasi orang yang memiliki masalah sosial seperti yang disebutkan di atas.

Dalam konteks inilah pentingnya peran pekerja sosial dalam dunia pendidikan. Pekerja sosial memberikan dukungan yang penting terhadap masalah tersebut. Dukungan yang tidak hanya bersifat formal dalam dunia pendidikan, akan tetapi pelayanan yang bersifat informal dalam menangani masalah-masalah sosial yang dihadapi anak putus sekolah. Adanya peran ini sudah selayaknya mengingatkan kepada dunia pendidikan mengenai pentingnya peran pekerja sosial. Penulis berharap, pekerja sosial mendapatkan peran khusus dalam dunia pendidikan.

BAB III
PELAYANAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B

Anak putus sekolah mempunyai permasalah yang kompleks, tidak saja masalah pendidikan itu sendiri namun juga persoalan ekonomi maupun sosial. Menyelamatkan kehidupan anak putus sekolah bisa saja dilakukan pada bidang sosial-ekonomi. Namun demikian, mau tidak mau secara pendidikan seorang anak tetap membutuhkan bukti "hitam di atas putih". Tanda bukti "hitam di atas putih" ini sebut saja ijazah pendidikan, hal ini disebabkan sistem di negeri ini masih membutuhkan bukti tersebut untuk kepentingan-kepentingan formal, seperti mencari pekerjaan. Oleh karena itu, untuk mengangkat harkat dan martabat anak putus sekolah, diperlukan pelayanan pendidikan untuk mengganti pendidikan formal yang telah ditinggalkan. Di sinilah pentingnya pelayanan pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah. Bab ini akan menguraikan tentang pelayanan pendidikan kesetaraan khususnya paket B sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendidikan anak putus sekolah.

A. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan non formal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003). Menurut pendapat Axin (1976) dan Soedomo (1989)

pendidikan non formal adalah kegiatan belajar yang disengaja oleh warga belajar dan pembelajar di dalam suatu latar yang diorganisasi (berstruktur) yang terjadi di luar sistem persekolahan.

Sementara itu, menurut Kleis et al (1986) dan Nurdin (1988), pendidikan non formal memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut: 1) biasanya berkaitan dengan misi yang mendesak dan praktis, 2) tempat pendidikan biasanya di luar kelas atau di situasi belajar yang sebenarnya, 3) bukti memiliki ilmu pengetahuan dinilai dari ketrampilannya, bukan dari sertifikasinya, 4) biasanya tidak terlalu terkait dengan ketentuan yang ketat, 5) isi, staf atau strukturnya tidak terorganisasi, 6) peserta biasanya bersifat sukarela, 7) biasanya memiliki aktifitas sampingan, 8) pelajaran jarang bertingkat dan berurutan, 9) pendidikan lebih murah dari pendidikan formal, 10) persyaratan penerimaan lebih ringan, 11) penilaian keberhasilan peserta berdasarkan kemampuan mendemonstrasikan ketrampilan dan 12) tidak terbatas untuk peserta dan kurikulum tertentu, tetapi dapat diperbaharuhi dan dikembangkan.[1]

Pendidikan non formal (PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal.[2] Sedangkan salah satu bentuk layanan pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah untuk warga masyarakat yang belum dapat mengikuti pendidikan formal atau tidak selesai (DO), Hal ini sering disebut dengan pendidikan kesetaraan.

---

[1] Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm, 7.

[2] Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Petunjuk Teknis Pengusulan dan Pemanfaatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C, (Yogyakarta: Tidak diterbitkan, 2009), hlm. 1.

Pendidikan kesetaraan merupakan pintu masuk bagi praktisi *homeschooling* yang ingin mengintegrasikan pendidikan anak-anaknya dengan sistem pendidikan nasional yang diterapkan di Indonesia. Definisi setara adalah "sepadan dalam civil effect, ukuran, pengaruh, fungsi, dan kedudukan."[3]

Ketentuan mengenai kesetaraan ini diatur dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26, ayat (6): "Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan".[4] Paket-paket pendidikan kesetaraan dirancang untuk peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pemah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian pendidikan kesetaraan yang menyelenggarakan pendidikan umum mencakup program paket A setara SD/MI, paket B setara SLTP/MTs, dan paket C setara SLTA/MA dengan penekanan dan pengusaan pengetahuan, ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik.

Ada beberapa perbedaan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal, Perbedaan tersebut antara lain mengenai tempat, jenjang, waktu, umur peserta didik, orientasi studi, materi, penyajian materi, evaluasi, ijazah, persyaratan kelembagaan, perlengkapan, pengajar, peserta didik, dan biaya.

[3] http://www.sumardiono.com.

[4] Acuhan Proses Pelaksanan dan Pembelajaran Pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, (Jakarta Direktorat Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional 2006), hlm. 2.

Pada prinsipnya pendidikan formal lebih ketat daripada ketentuan pendidikan non formal. Untuk mengetahui lebih jelas perbedaan kedua jenis pendidikan tersebut, perhatikan tabel 2.1. berikut.[5]

Tabel 2.1. Perbedaan antara pendidikan non formal dan pendidikan formal.

No	Pendidikan Non Formal	Pendidikan Formal
1	Pada umumnya tidak dibagi atas jenjang	Selalu dibagi atas jenjang.
2	Waktu penyampean lebih pendek	Waktu penyampean lebih panjang
3	Umur peserta didik di suatu kursus tidak perlu sama.	Umur peserta didik di suatu jenjang relatif homogen.
4	Berorientasi studi jangka pendek dan cepat kerja.	Berorientasi studi jangka panjang.
5	Merupakan respon kebutuhan khusus yang mendesak.	Merupakan respon kebutuhan umum dan relatif jangka panjang.
6	Materi pelajaran lebih banyak bersifat praktis dan khusus.	Materi pelajaran lebih banyak bersifat akademis dan umum.
7	Ijazah kurang memegang peranan penting, terutama bagi penerima peserta didik pada tingkat pendidikan lebih tinggi.	Ijazah memegang peranan penting terutama bagi penerima peserta didik pada tingkatan pendidikan lebih tinggi.
8	Pada umumnya terjadi di luar kelas.	Umumnya terjadi di kelas.
9	Biaya pendidikan lebih murah	Biaya pendidikan lebih mahal
10	Merupakan kegiatan sampingan	Merupakan kegiatan Utama

[5] Suprijanto, Pendidikan..., hlm, 9-10.

11	Kurikulum	Kurikulum dan materi lebih ketat.
12	Persyaratan kelembagaan lebih luwes	Persyaratan kelembagaan lebih ketat.
13	Persyaratan perlengkapan lebih luwes	Persyaratan perlengkapan lebih ketat.
14	Persyaratan pengajar lebih luwes	Persyaratan pengajar lebih ketat
15	Persyaratan peserta didik lebih luwes	Persyaratan siswalebih ketat.

B. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Paket B

Salah satu program pokok dalam pelaksanaan pendidikan non formal yaitu paket B setara SLTP. Paket B ditujukan kepada siswa lulusan SD tidak melanjutkan SLTP dan siswa putus SLTP dengan prioritas pada anak usia wajib belajar yang karena faktor seperti ekonomi, sosial, jarak sekolah yang jauh sehingga tidak mampu mengikuti program persekolahan. Kegiatan belajar diselenggarakan dalam kelompok belajar, terdiri dari rata-rata 40 orang dibantu 6 orang tutor. Lama pendidikan minimal 3 tahun apabila mulai belajar dari setara kelas 1 SLTP.[6]

Dengan demikian, program paket B setara SLTP berfungsi menuntaskan wajib belajar sembilan tahun terutama pada kelompok usia 3 tahun di atas usia sekolah dan bagi siapapun yang terkendala memasuki jalur pendidikan formal karena berbagai hal serta bagi individu yang menentukan pendidikan kesetaraan atas pilihan sendiri.

C. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Paket B

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam segala proses kegiatan pembelajaran paket B, maka diperlukan

[6] Umberto Sihombing, Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan (Jakarta: PD Mahkota, 1999), hlm. 22-25.

pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Prinsip pendidikan orang dewasa ini dimaksudkan untuk memberi pengetahuan tentang apa saja yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan pendidikan orang dewasa dengan baik. Prinsip-prinsip belajar orang dewasa adalah sebagai berikut. Menurut Arif, orang dewasa akan belajar dengan baik jika:[7]

1. Tidak terjadi penyeragaman pembelajaran, pemikiran, karena masing-masing berbeda dengan pengalaman, pemikiran, konsep dan afirmasi (pengakuan) terhadap kenyataan.
2. Situasi saling mempercayai, bekerjasama dan saling menghormati
3. Materi yang diberikan berhubungan dengan keadaan (kebutuhanya).
4. Mereka merumuskan sendiri tujuan belajar yang hendak mereka capai.
5. Situasi belajar dialogis.

Menurut teori andragogik orang dewasa dilihat sebagai orang yang telah memiliki kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar. Namun, minat dan kebutuhan pada orang dewasa secara umum berbeda dengan anak-anak. Orang dewasa yang sudah terlihat dan terlibat dalam peran sosial tertentu mempunyai komitmen terhadap kegiatan belajar, mencari nafkah, pengembangan karir, perbaikan diri dan lingkungannya. Kondisi semacam ini yang mendorong sekaligus membedakan tentang kebutuhan dan minat belajar orang dewasa kebutuhan dan minat belajar bagi anak.

D. Metode Pembelajaran

Proses belajar mengajar orang dewasa adalah suatu proses berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan oleh pelajar atau

[7] Zainudin Arif, Andragogi, (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 2-5.

peserta didik dan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh orang pendidik atau pembimbing proses ini juga dapat dikatakan sebagai proses "menerima-memberi" dalam arti peserta didik menerima pelajaran dan pendidik memberi pelajaran.

Metode pendidikan orang dewasa sebaiknya dipilih berdasarkan tujuan pendidikan, yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1) membantu pengalaman masa lalu yang dimilikinya melalui cara baru, 2) memberi pengetahuan dan ketrampilan baru, yakni mendorong individu untuk meraih pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik daripada pengetahuan dan ketrampilan yang sudah dimilikinya.[8]

Berdasarkan kedua jenis tujuan pendidikan tersebut maka proses belajar dapat digambarkan sebagai kontimun proses belajar. Berikut ini akan dijelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan pada ke dua ujung kontinum proses belajar.

Tabel 2.2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan pengalaman dan perluasan pengalaman.

Hal	Penataan Pengalaman	Perluasan Pengalaman
Persiapan dan Orientasi	Membuat peserta didik merasa enak mengungkapan sukses dan kegagalan di masa lalu. Mengutamakan makna penilaian pengalaman masa lalu untuk dapat mengatasi masalah serupa di kemudian hari.	Mengutamakan masalah yang kini tidak dapat dipecahkan oleh peserta didik, tetapi dapat dipecahkan setelah mendapatkan bahan baru. Membantu peserta didik untuk mengatasi ketidakmampuanya mempelajari bahan baru.

[8] Suprijanto, Pendidikan..., hlm. 72-74.

Suasana dan Kecepatan Belajar	1. Banyak orang merenung tanpa tergesa-gesa. 2. Sangat dipengaruhi oleh reaksi dan kemauan belajar.	1. Menarik dan mengesankan. 2. Sangat ditentukan oleh sifat dan isi pelajaran.
Peran Tutor lebih Banyak	Menciptakan suasana, lebih memberi makna pengalaman belajar, memancing ungkapan pengalaman, memberi umpan balik, membantu membuat generasi	Mengenal masalah peserta didik, menjelaskan sasaran pelajaran dan konsep baru atau memperhatikan tingkah laku.
Peran Peserta didik lebih banyak	Mengungkapkan data mengenai pangalaman dan didik pendapatnya, menganalisis pengalamanya, menggali banyak alternatif dan manfaat.	Mengolah data dan konsep baru, melihat menerapkan bahan baru pada situasi nyata.
Sukses tergan-tung dari	Suasana yang bebas dari ancaman, rasa kebutuhan peserta didik untuk menemukan pendekatan baru dalam masalah lama.	Kejelasan penyajian baru, penghargaan peserta didik terhadap pembimbing, relevansi bahan baru menurut penilaian peserta didik

Pembelajaran hendaknya menekankan kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Fokus pembelajaran adalah untuk mengoptimalkan penguasaan hasil pembelajaran secara tuntas. Kegiatan pembelajaran ini hendaknya dapat meningkatkan perolehan pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai oleh peserta didik dalam menyelesaikan masalah atau membuat keputusan yang bijak, di antara metode-metode pembelajaran yang dapat diterapkan untuk tujuan tersebut adalah:[9]

[9] Ibid, hlm. 37-38.

1. Secara Mandiri (Individu)

Pembelajaran mandiri dilakukan oleh warga belajar dengan menggunakan seperangkat modul yang ada dan/atau bahan-bahan bacaan yang tersedia di lingkungannya, atau sarana belajar pelengkap lain yang menunjang tujuan pembelajaran. Pembelajaran secara mandiri juga dapat diwujudkan dalam bentuk tugas-tugas rumah yang ditujukan untuk lebih meningkatkan retensi terhadap materi yang diberikan tutor saat tatap muka serta kemandirian menyelesaikan masalah.

2. Secara Tatap Muka/Tutorial

Pembelajaran secara tutorial, dilakukan dengan metode diskusi, di mana seluruh warga belajar dikelompokkan untuk membahas bahan yang harus dipelajari, tutor berperan sebagai pembantu warga belajar dalam memecahkan hal-hal yang tidak dapat dimengerti. Pada saat tatap muka warga belajar dapat mengajukan berbagai pertanyaan atau meminta bimbingan dari tutor terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami selama mandiri atau belajar dalam kelompok kecil.

3. Secara dalam Kelompok Kecil

Pembelajaran dalam kelompok kecil ditujukan untuk membangkitkan jiwa saling membantu di antara warga belajar, agar mempunyai kemampuan lebih, dilatih untuk mau membantu yang kurang, agar mereka sama-sama mampu mengatasi berbagai kesulitan yang dialami. Dengan pola di atas membiasakan warga belajar mampu mengutarakan pikirannya secara runtun, mampu berkomunikasi dengan orang lain, menanamkan solidaritas setia kawan.

E. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Paket B

Kelompok belajar paket B merupakan salah satu bentuk pelayanan pendidikan non formal yang dikembangkan bagi warga masyarakat yang ingin memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang sejaiar/sepadan dengan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Kegiatan belajar paket B tidak harus dikelola oleh lembaga formal seperti sekolah, namun dapat dikelola oleh lembaga informal atau lembaga swadaya masyarakat.

Kegiatan ini adalah berupa "kelompok belajar" maka dalam pembelajaran mengutamakan pendekatan kelompok dibanding dengan pendekatan klasikal.[10] Setiap kelompok terdiri dari 30-40 orang dan jumlah tersebut dikelompokan menjadi 5-6 kelompok. Masing-masing kelompok dibina oleh seorang tutor. Kurikulum disusun berdasarkan SLTP tahun 1994 dalam bentuk modul yang telah dipersiapkan oleh pihak Depdiknas.

Dalam perjalananya, kegiatan paket B memang mengalami berbagai kendala. Beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan paket B antara lain;[11]

1. Perkembangan program yang belum diimbangi jumlah dan mutu tenaga yang memadai. Misalnya untuk penilik pendidikan masyarakat, masih ada beberapa penilik dikmas yang menangani lebih dari satu kecamatan, dan dari kecamatan yang belum seluruhnya memiliki penilik dikmas.

[10] Pendekatan kelompok merupakan pendidikan yang menggunakan metode pembelajaran berkelompok artinya satu kelompok belajar dapat terdiri maksimal sepuluh orang dan dipandu oleh seorang tutor. Sedangkan metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan klasikal yaitu metode pembelajaran individu perindividu, metode ini sering digunakan di pondok-pondok pesantren salafiah. Pembelajaran dilakukan dengan cara siswa berhadapan satu-satu dengan ustadz/tutor. Sedangkan di PKBM Diponegoro menggunakan metode pembelajaran kombinasi antara keduanya, artinya dalam belajar kelompok, apabila ada salah salu siswa yang mampu membantu siswa lain, maka siswa tersebut dapat diminta bantuannya untuk membantu siswa lain dengan menggunakan metode belajar klasikal

[11] Umberto Sihombing, Pendidikan..., hlm. 42-47.

2. Kebutuhan tutor untuk paket B seharusnya rata-rata membutuhkan 8 tutor, kenyataan di lapangan baru dapat dipenuhi rata-rata 5 tutor untuk setiap kelompok belajar. Apabila secara akademik, warga belajar paket B diharapkan benar-benar setara SLTP maka seharusnya setiap kelompok dibantu oleh 10 orang tutor.
3. Tidak adanya tempat belaiar yang pasti, sehingga sukar untuk memantau kebenaran pelaksanaan program pembelajaran. Di sisi lain kualitas hasil pembelajaran sulit dilihat kebenarannya dan sukar di ukur tingkat keberhasilanya.
4. Lemalmya akurasi data/informasi tentang sasaran program, karena terbatasnya tenaga lapangan baik kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukungnya yang belum memadai. Di sisi lain, aspek yang banyak menghambat adalah jadwal pelaksanaan belajar-mengajar yang tidak selalu dapat dilaksanakan tepat waktu, akibat karakteristik sasaran program yang sangat khusus, yaitu kehidupannya sangat terkait dengan musim, adat-istiadat/sosial budaya.

BAB IV
SELAYANG PANDANG PKBM DIPONEGORO

Penanganan terhadap anak putus sekolah dalam hal ini dilakukan secara kelembagaan oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Diponegoro. Oleh karena itu kurang lengkap rasanya jika dalam buku ini tidak menyajikan secara khusus siapa dan bagaimana sebenarnya PKBM Diponegoro tersebut. Selain itu, bab ini juga merasa perlu untuk menggambarkan mengenai daerah yang yang menjadi fokus kajian, kondisi yang dialami penduduk, kegiatan keseharian penduduk, serta pendidikannya. Beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat akan diuraikan lebih rinci sehingga informasi mengenai objek kajian bisa diketahui lebih baik. Dalam hal ini juga gambaran mengenai lembaga yang menjalankan program paket B perlu dikemukakan.

A. Kondisi Sosial-Ekonomi Desa Maguwoharjo

Kajian dalam buku ini terpusat di desa Maguwoharjo, tempat di mana lembaga PKBM Diponegoro beroperasi. Desa ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Kotamadya Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari data Desa Maguwoharjo, dapat diketahui bahwa batas-batas wilayah Desa Maguwoharjo yang memiliki luas 9.928.300 ha adalah sebagai berikuti: sebelah Utara berbatasan dengan desa Purwomartani Ngemplak, sebelah Timur berbatasan dengan desa Kalasan, sebelah Selatan

berbatasan dengan desa Banguntapan, sebelah Barat dengan desa Condongcatur.

Jarak desa dari pusat pemerintah mulai dari kecamatan, kabupaten, propinsi dan ibu kota negara adalah sebagai berikut: jarak dari pusat pemerintah kecamatan adalah 16 km, jarak dari ibu kota kabupaten adalah 15 km, jarak dari ibu kota propinsi adalah 10 km, jarak dari negara adalah 603 km.

Jarak desa dengan pusat-pusat pemerintah yang relatif dekat ini memungkinkan mampu mendukung mobilitas yang cepat dari desa ke pusat pemerintah tersebut. Kondisi ini sangat menguntungkan karena kebutuhan mereka sehari-hari dapat dengan mudah dipenuhi.

Desa Maguwoharjo merupakan salah satu daerah padat di kecamatan Depok Sleman Yogyakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 26.308 orang yang terdiri dari 13.437 yang berjenis kelamin laki-laki dan 12.871 yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan kepala keluarga berjumlah 8.419 kepala keluarga yang terdiri dari 7.580 kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki dan 839 kepala keluarga berjenis kelamin perempuan. Penduduk desa Maguwoharjo tersebar di 72 RW yang terbagi dalam 172 RT.

Perilaku dan gaya hidup warga desa Maguwohuarjo mengalami perubahan-perubahan ini terjadi karena pengaruh dan kemampuan mereka untuk menghadapi prilaku masyarakat kota karena desa ini berada pada daerah sub urban. Perubahan prilaku warga tersebut terutama pada perubahan tentang gaya hidup pada mudi-mudinya. Mereka mulai menyenangi pola hidup yang cenderung konsumtif misalnya kepemilikan telepon genggam dan berkendaraan bermotor. Namun demikian, meskipun berubah kerjasama antar penduduk dan gotong royong masih mewarnai tata pergaulan di desa Maguwoharjo.

Secara umum perekonomian berkembang sangat pesat. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di desa Maguwoharjo Penduduk desa Maguwoharjo ada juga yang bekerja di kantor, di sektor swata maupun yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS) selain itu juga sebagai petani dan lain-lain. Dari cacatan desa Maguwoharjo tercatat ada sekitar 1404 orang yang bekerja sebagai PNS, sementara pekerja swasta tercacat 3347 orang. Catatan lainya yang mencolok adalah banyaknya jumlah tani yaitu sekitar 3052 orang dan sebagai buruh tani sekitar 525 orang. Hal ini karena di wilayah desa Maguwoharjo masih luas lahan pertanian. Sedangkan yang bekerja sebagai pemulung berjumlah 4 orang dan pada bidang jasa sekitar 206 orang.[1]

Dari pengamatan penulis di lapangan, memang banyak ditemui jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai swasta. Dengan demikian penduduk desa Maguwoharjo memiliki mata pencaharian yang rentan terhadap perubahan, sehingga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi sosial masyarakat. Secara umum, artinya ketika ada perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh Misalnya kenaikan harga BBM, kenaikan harga beras atau yang lainya.

Selain itu dapat dirasakan suasana keagamaan yang harmonis dan damai setiap penganut agama dapat menjalankan ibadahnya dengan baik, dapat terlihat kenyataan bahwa masyarakat bisa hidup damai berdampingan. Dalam hal melaksanakan rutinitas sebagai upaya menjalankan ajaran agama dan kepercayaan yang diyakini masyarakat masih relatif kuat, toleransi antar umat beragama tetap terbina.

Penduduk desa Maguwoharjo sebagian besar memeluk agama Islam yaitu berjumlah 23.657 orang, penganut katolik

[1] Data Demografi Tahun 2008 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta.

sebanyak 1.608 orang, sementara penduduk yang beragama kristen sebanyak 89 orang, agama hindu dianut oleh 49 orang dan agama budha dianut oleh 5 orang, akan tetapi tidak terlihat ada sikap arogansi maupun pelecehan terhadap minoritas. Selain itu desa Maguwoharjo juga bertempatan satu pondok pesantren yaitu pondok pesantren Diponegoro yang berada bawah yayasan Diponegoro, Dengan kondisi yang heterogen tersebut tidak menyebabkan adanya batasan-batasan yang sangat mencolok.

Penduduk desa Maguwoharjo sebagian besar berpendidikan pada tingkat SD yaitu berjumlah 7587 orang, pada tingkat SLTP berjumlah 4205 orang, pada tingkat berjumlah SLTA 3461 orang dan pada tingkat perguruan tinggi S-1 berjumlah 221 orang sedangkan jumlah penduduk yang mengalami putus sekolah berjumlah 232 orang.

Dari hasil pengamatan di lapangan dapat dirasakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk semakin menurun jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi. Selain itu, penduduk desa Maguwoharjo memiliki gedung sekolah sebagai sarana pendukung pendidikan. Jumlah gedung sekolah yang ada di desa Maguwoharjo dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Jumlah gedung sekolah di Desa Maguwoharjo

No	Tingkat	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta
1	SD	12	2
2	SLTP	2	3
3	SLTA	2	4

Sumber: data demografi tahun 2008, desa Maguwohajo.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sarana pendukung pendidikan penduduk desa Maguwohajo telah tersedia baik pada

tingkat SD, SLTP maupun pada tingkat SLTA. Hal ini merupakan suatu bentuk respon pemerintah bagi penduduk desa Maguwohajo untuk memperolah pendidikan setinggi-tingginya.

B. Mengenal PKBM Diponegoro

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) merupakan salah satu altematif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran bahwa dengan melembagakan PKBM, akan banyak potensi yang selama ini tidak tergali akan dapat digali, ditumbuhkan, dimanfaatkan dan didayagunakan melalui pendekatan-pendekatan kultural dan persuatif.

PKBM sebagai lembaga yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat. Secara kelembagaan padanya melekat beberapa fungsi yang secara hakiki sulit dipisahkan. PKBM merupakan sebagai wadah pembelajaran, artinya tempat warga masyarakat dapat menimba ilmu dan memperoleh berbagai jenis ketrampilan dan pengetahuan fungsional yang dapat didayagunakan secara cepat dan tepat dalam upaya perbaikan kualitas hidup dan penghidupannya.

Tujuan kelembagaan PKBM adalah memberdayakan masyarakat agar menjadi mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan belajarnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. PKBM telah banyak berdiri dan terbentuk hampir setiap kecamatan dan desa/kelurahan yang salah satunya adalah PKBM Diponegoro. PKBM Diponegoro terletak di desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.

1. Sejarah Berdiri PKBM Diponegoro

PKBM Diponegoro pada awal pendirianya bernama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Berdiri pada tanggal 15

Oktober 1999 atas prakarsa tokoh pemuda dan tokoh masyarakat desa Maguwoharjo PKBM ini pada awalnya berada di bawah naungan Yayasan Paradigma pimpinan bapak Murtadho SH.

Namun dalam perkembangannya, pada tahun 2000 PKBM ini berganti nama menjadi PKBM Diponegoro dan tidak lagi di bawah binaan Yayasan Paradigma, akan tetapi sampai kajian ini dilakukan (tahun 2009), PKBM Diponegoro menginduk pada yayasan pondok pesantren Diponegoro. PKBM Diponegoro telah berganti periode kepengurusan sebanyak dua kali periode. Satu periode kepengurusan adalah memiliki masa bakti lima tahun, dari berdiri hingga kajian dilaksanakan PKBM Diponegoro dipimpin oleh Drs. Muh. Khairudin.

Badan hukum yang dimiliki oleh PKBM Diponegoro untuk menjalankan aktiiitas organisasi antara lain;[2]

a. No. 03/Yasandip/II/2000 tanggal 5 Februari 2000 oleh Yayasan Pondok Pesantren Diponegoro.
b. No.10/Kep.L.D/2003 tanggal 18 Juli 2003 oleh Lurah Desa Maguwoharjo.
c. No. 029/4219/IV/2007 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

2. Visi, Misi, dan Tujuan PKBM Diponegoro
   a. Visi PKBM Diponegoro: PKBM Harapan dan kebanggan masyarakat.
   b. Misi PKBM Diponegoro
      1) Mengupayakan melek aksara bagi warga masyarakat melalui pendidikan keaksaraan fungsional.
      2) Mensukseskan wajib belajar sembilan tahun melalui pendidikan kesetaraan (paket A, paket B dan paket C).
      3) Mengurangi pengangguran, keterbelakangan dan

[2] Laporan Pertanggungjawaban Ketua PKBM Diponegoro Masa Bakti 2003-2008

kemiskinan melalui kursus-kursus, pendiclikan kecakapan hidup, pendidikan gender.

4) Membudayakan masyarakat senang membaca melalui pelayanan perpustakaan/TBM.
5) Menyelenggarakan pendidikan usia dini.

c. Tujuan PKBM Diponegoro

1) Masih banyaknya warga masyarakat desa Maguwoharjo yang buta aksara.
2) Program wajib belajar 9 tahun belum terrealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat masih banyaknya siswa mengalami drop out (DO) baik pada tingkat SD, SLTP maupun pada tingkat SLTA.
3) Masih banyak warga miskin.
4) Jumlah pengangguran yang masih cukup banyak.[3]

3. Struktur Organisasi PKBM Diponegoro

Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang berkelompok bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi disini merupakan proses kerjasama yang serasi diantara sekelompok orang dalam suatu wadah yang sistematis, berfikir, dan bertindak guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah kesatuan kerangka organisasi yang ditetapkan untuk proses manajerial, sistem dan pola tingkah laku yang muncul dan terjadi di dalam praktek penyelenggaraan organisasi dan manajamen.

Sesuai dengan data yang diperoleh penulis, struktur organisasi PKBM Diponegoro dapat dilihat pada gambar 3.1. berikut:

[3] Laporan Pertanggungjawaban Ketua PKBM Diponegoro Masa Bakti 2003-2008

Struktur Organisasi PKBM Diponegoro

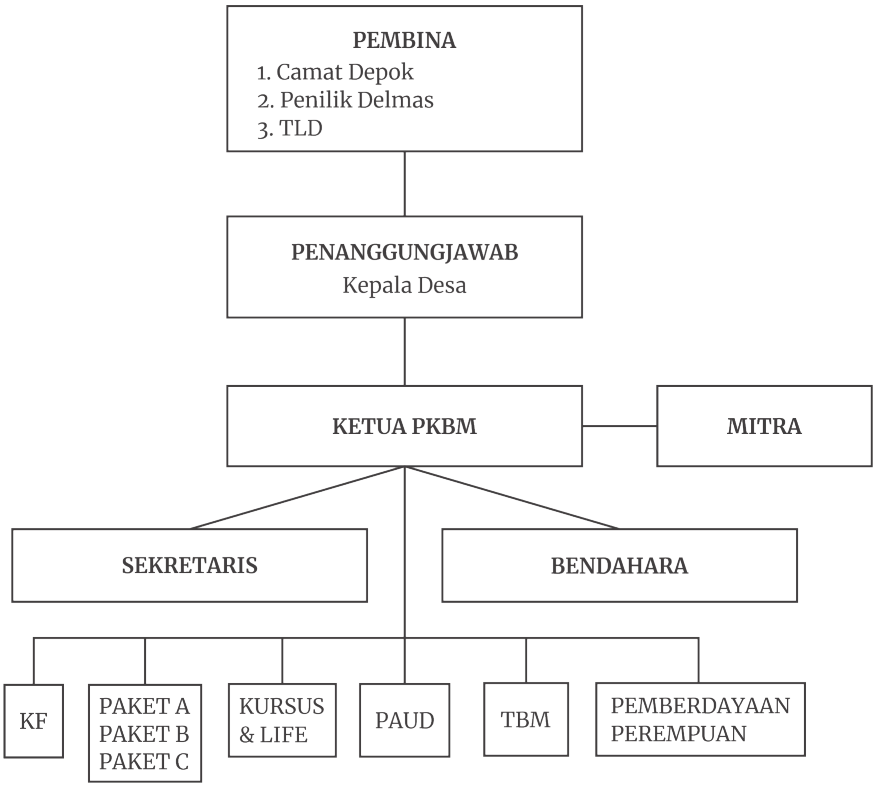

Gambar 3.1. Struktur Organisasi PKBM Diponegoro
Sumber: Dokumentasi PKBM Diponegoro

Di PKBM Diponegoro, struktur organisasi merupakan susunan atau penempatan jembatan dengan fungsi dan tugas masing-masing sehingga tercipta satu kesatuan kerja untuk mencapai tujuan bersama. Struktur kepengurusan PKBM Diponegoro meliputi: 1) Pembina, 2) Penanggungjawab, 3) Pengurus harian PKBM; ketua, sekretaris dan bendahara, 4) mitra dan 5) penanggungjawab program; program KF, program keaksaraan, program kursus & life skill, program PAUD, program TBM, dan program pemberdayaan perempuan.

Susunan Pengurus PKBM Diponegoro Periode 2008-2013		
Pembina		Camat
		Penilik
		TLD
Penanggungjawab		Lurah Desa Maguwoharjo
Ketua		Drs. Muh. Khoirudin
Sekretaris		Wiji Lestari
Bendahara		Istianah
		Astutik
Penanggungjawab Program		Widanarti Rumsari, S.PD (Koordinator)
1	KF	Ponijo (Koordinator)
		Siti Fatonah, S.Pd.
		Wadidi Panggung, S.Pd.
2	Kesetaraan	Drs. Noor Khafi (Koordinator)
		Priyanto Ari M, S.Pd.
		Asy'ari. S.Pd.
3	Kursus & Lifeskill	Ngatimi (Koordinator)
		Siti Sholihah
4	Paud	Sugeng Riyadi (Koordinator)
		Siti Maryatun
5	TBM	Dra. Waqingah, M.Pd.
		Immawati, S.Ag.
6	Pemberdayaan Perempuan	

Gambar 3.2. Susunan Pengurus PKBM Diponegoro
Sumber : Dokumentasi PKBM Diponegoro

C. Program Kegiatan PKBM Diponegoro

1. Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keaksaraan Fungsional

a. Pendidikan Kesetaran SD (Paket A)

Program ini dilaksanakan dengan prioritas kepada anak usia sekolah dasar yang tidak putus sekolah atau putus Sekolah Dasar dalam usia wajib belajar (7-15 tahun). Program paket A di PKBM Diponegoro berjalan pada tahun 2004 dengan jumlah warga belajar 10 orang. Dalam pelaksanaan program ini direkomendasikan pada PKBM Sinar Mleti, Sleman Yogyakarta.

b. Pendidikan Kesetaraan SLTP (Paket B)

Upaya mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, paket B setara SLTP merupakan salah satu program pelayanan pendidikan yang dilaksanakan melalui jalur Pendidikan Non Formal (PNF). Program ini ditujukan kepada siswa lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SLTP dan siswa putus SLTP dengan prioritas pada anak usia wajib belajar yang karena berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Tujuan penyelenggaraan program paket B menurut SK Mendikbud No.0131/u/1994 yaitu memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui program paket A atau setara SD yang bermanfaat bagi warga belajar untuk peningkatan hidupnya sebagai pribadi anggota masyarakat, dan warga negara serta memungkinkan warga belajar yang memenuhi persyaratan untuk bekerja dan/atau melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

c. Pendidikan Kesetaraan SMA (Paket C)

Program ini dilaksanakan dengan prioritas kepada anak usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang tidak mampu

meneruskan atau putus sekolah pada tingkat SLTA. Program paket C di PKBM Diponegoro berjalan pada tahun 2004 hingga kajian ini dilakukan.

d. Pendidikan Keaksaran Fungsional

Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat penyandang buta aksara untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan keaksaraan (membaca, menulis dan berhitung) serta ketrampilan fungsional yang dibutuhkan terkait dengan kemampuan keaksaraan itu, sehingga dengan kemampuan keaksaraan itu mereka dapat menguasai pengetahuan dasar (*basic education*) yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan komunitas hidupnya.

Pendidikan keaksaran merupakan salah satu prioritas program nasional dengan target menurunkan jumlah orang dewasa buta huruf sebesar 50% pada tahun 2009. Kegiatan ini diselenggarakan untuk melayani warga masyarakat yang menyandang buta aksara, usia 10-44 tahun, dengan prioritas usia 17-30 tahun. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diselenggarakan selama enam bulan dalam kelompok-kelompok belajar, rata-rata tiap kelompok berjumlah 10 orang, dibantu seorang pendamping. Program ini di PKBM Diponegoro telah mengentaskan 290 warga yang buta aksara yang berada di dusun Sembego, Pugeran, Ngawen, Kepuhsari, Paingan, Corongan dan Sopalan desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Berikut tabel 3.2. adalah bentuk layanan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional.

Tabel 3.2. Layanan pendidikan kesetaraan dan KF

No	Layanan Program	Tahun						Jml
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1	KF	30	-	-	60	40	60	290
2	Paket A	-	10	-	-	-	-	10
3	Paket B - Reguler - Non Reguler	 60 -	 - -	 20 -	 40 -	 35 11	 40 40	 195 51
4	Paket C	-	20	21	22	21	21	105

Sumber: Dokumentasi PKBM Diponegoro Akhir Tahun 2008.

2. Pembinaan Kursus

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan pendidikan melalui penyelenggaraan kursus-kursus kejuruan dan/atau ketrampilan sehingga mampu memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. PKBM Diponegoro telah memberikan bantuan kepada warga belajar berupa 10 unit mesin jahit dan modal usaha. Adapun kursus yang pernah dilaksanakan oleh PKBM Diponegoro antara lain:

Tabel 3.3 Layanan Kursus

No	Jenis Kursus	Tahun	**Jumlah**
1	Komputer	2003	5 org
2	Sopir Mobil	2004	5org
3	Menjahit, Kerajinan Sepatu	2006	20 org

3. Kelompok Belajar Usaha

Program KBU berjalan pada tahun 2003 s/d 2004, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kemampuan warga belajar yang belum memiliki sumber mata pencaharian tetap dan berpenghasilan rendah sehingga dari

pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kemampuan yang dimiliki itu dapat menjalankan usaha atau bekerja pada usaha orang lain dalam rangka untuk meningkatkan penghasilanya. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 3.4. berikut:

Tabel 3.4. Kegiatan KBU PKBM Diponegoro

No	Jenis KBU	Tahun	Jml	Hasil
1	a. Ternak Ayam b. Bengkel Motor	2003 2003	5 org 5 org	Gagal karena kena penyakit. Berjalan baik dan berkembang
2	Loundry	2004	5 org	Berjalan lancar

Sumber : Dokumen PKBM Diponegoro

Program ini ditujukan kepada warga belajar yang minimal bebas buta aksara atau lulus paket A setara SD dan paket B setara SLTP, usia 17-44 tahun. Warga belajar dalam menjalankan usahanya dapat secara berkelompok terdiri dari 3-5 orang, atau sendiri-sendiri namun masih dalam ikatan satu kelompok belajar.

4. Pendidikan Perempuan

Pengajaran merupakan transformasi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk memajukan kualitas sumber daya manusia. Perubahan pengetahuan, sikap dan prilaku masyarakat ditentukan oleh pendidikan yang mereka dapatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan perempuan merupakan pendidikan informal harus mampu menanamkan unsur terpenting dalam pendidikan pada umumnya yakni kesadaran dari keterbelakangan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan yang mereka alami.

Program yang dikembangkan secara khusus pada perempuan usia produktif, telah berkeluarga, dan tergolong miskin Pelayanan

Pendidikan yang diberikan berupa pelatihan ketrampilan usaha. Setelah mendapatkan pengetahuan diharapkan memunculkan kesadaran masyarakat yang akan membawa dampak pada meningkatkan kesejahteraan dalam lingkungan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga dengan kemampuan sendiri mereka mampu terbentur adanya bias gender.

5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Taman Bacaan Masyarakat yang disingkat dengan "TBM", TBM merupakan program pendukung kegiatan kesetaraan maupun program lain. Berdiri pada tanggal 5 Februari 2005, adapun sebagai ketua pelaksana adalah saudari Siti Maryatun dibantu sekretaris adalah saudari Dewi Triastuti dan bendahara saudari Astutik. TBM telah mendapat dukungan dari Dinas PLS berupa dana selama dua tahun yakni tahun 2005 dan tahun 2006. Kegiatan TBM disamping memberikan pelayanan bacaan bagi masyarakat juga pemah mengadakan kegiatan lomba bungkus kado serta lomba mading.

6. PAUD/PADU

Masa depan bangsa dan negara akan banyak ditentukan oleh keberhasilan dalam menyiapkan sumber daya manusia sedini mungkin, baik melalui mutu kesehatan, pendidikan, bangsa sehingga tumbuh manusiia kelak mampu mewujudkan cita-cita bangsa yaitu musyarakat adil dan makmur. Program pendidikan usia dini dirintis pada tahun 2003 dengan mengikuti lomba administrasi PAUD yang dikekola satu manajamen TK "Harapan Bangsa" dan masuk peringkat 10 besar dari 25 PAUD se Kabupaten Sleman dan mendapat hadiah berupa peralatan dan APE. Pada tahun berikutnya telah dirancang namun mengalami kefakuman dan pada tahun 2006 mulai bangkit kembali dan memunculkan pemikiran pendirian Play Group.*

BAB V
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Ketika seorang anak mengalami putus sekolah, maka hak pendidikan terhadap mereka menjadi terabaikan. Di sinilah diperlukan upaya penanganan terhadap anak putus sekolah tersebut. Upaya penanganan ini salah satunya dilakukan oleh PKBM Diponegoro yang menjadi fokus kajian dalam buku ini. Bab ini mengulas hasil bagaimana penanganan anak putus sekolah khususnya melalui pelayanan pendidikan paket B di PKBM Diponegoro dalam mengentaskan anak putus sekolah di desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta.

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh diungkapkan juga gambaran utuh mengenai proses pelaksanaan pelayanan pendidikan anak putus sekolan di desa Maguwoharjo yang difokuskan pada pelayanan program paket B oleh PKBM Diponegoro. Pada bagian akhir pemaparan ini penulis mengungkapkan berbagai kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program paket B di PKBM Diponegoro tersebut serta hasil sementara yang dicapai selama pelaksanaan. Pemaparan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang ideal tentang bagaimana strategi mengentaskan anak putus sekolah untuk masa depan mereka yang lebih baik.

A. Program Paket B untuk Anak Putus Sekolah

Kegiatan paket B adalah salah satu bentuk pelaksanaan pelayanan pendidikan dasar yang diselengarakan melalui pendidikan non formal yang dikembangkan setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Penama (SLTP). Selain itu paket B dirancang untuk mernberikan pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat yang telah selesai paket A atau telah selesai sekolah dasar (SD) tanpa mempertimbangkan usia warga belajar.

Dalam pelayanan paket B di PKBM Diponegoro di buka melalui dua jalur yaitu jalur reguler dan non reguler. Jalur reguler dikhususkan bagi warga belajar yang mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan pada jenjang SLTP. Mereka mengikuti proses pembelajaran dari kelas 1 s/d 3 (tiga tahun). Sedangkan jalur non-reguler dikhususkan bagi warga belajar yang tidak lulus ujian di sekolah/formal. Dalam proses pembelajarannya mereka diberi pembekalan/pendalaman materi, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti ujian nasional untuk menentukan kelulusan.

Adapun tahap-tahap dalam pelayanan pendidikan anak putus sekolah melalui paket B oleh PKBM Diponegoro adalah sebagai berikut:

1. Tahap Menyiapkan Tutor

Persiapan yang tak kalah penting umtuk mendukung terlaksananya program paket B dengan baik sesuai prinsip-prinsip yang telah digariskan adalah merekmt tenaga pendamping lapangan yang akan menjadi petugas pendampingan/tutor warga belajar dalam pelaksanaan paket B di PKBM Diponegoro.

Penyiapan tenaga pendamping/tutor ini dilakukan dengan bermitra SLTP Diponegoro, sebagai salah satu upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang berperan sebagai tenaga pendidik atau pendamping lapangan yang memiliki

peran sebagai ujung tombak dalam merealisasikan pelayanan paket B. Dalam hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh ketua PKBM Diponegoro bahwa tenaga pendidik/tutor paket B yang diperoleh berdasarkan atas kerjasama dengan pihak sekolah (SLTP Diponegoro). Para tutor/tenaga pendidik ini adalah para guru yang tugas jam mengajamya masih kurang yang diperbantukan pada paket B Diponegoro sehingga mereka perlu menambah jam mengajar pada sekolah lain baik pada bidang pendidikan formal maupun non formal.[1] Adapun tutor paket B PKBM Diponegoro tahun 2007/2008 sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1. Tutor paket B pada PKBM Diponegoro

No	Nama	Alamat	Pendidikan	Mata Pelajaran
1	Drs. Muh Khoirudin	Kepuhsari, Maguwoharjo	S1/UNY	Matematika
2	Drs. Jamhari	Sembego, Maguwoharjo	S1/IAIN	IPS
3	Widanarti Rumsari, S.Pd.	Solopan, Maguwoharjo	S1/UNY	PPKn
4	Waqingah, M.Pd.	Kepuhsari, Maguwoharjo	S2/ Tarbiyah	PAI
5	Immawati, S.Ag.	Jenengan, Maguwoharjo	S1/IAIN	IPA
6	Nurliadin, M.Pd.	Gejayan, Condongcatur	S2/UNY	Bhs. Inggris
7	Drs. Noor Kahfi	Sembego, Maguwoharjo	S1/IAIN	Bhs. Indonesia
8	Siti Fatonah	Sembego, Maguwoharjo	S1/UNY	IPA

Sumber: Dokumentasi PKBM Diponegoro

[1] Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PKBM Diponegoro

2. Tahap Pendataan Calon Warga Belajar

Perencanaan merupakan pelayanan awal yang dilakukan untuk memperhitungkan kelayakan sasaran yang harus dilayani serta dukungan-dukungan lain yang diperlukan guna mencapai tujuan paket B. Persiapan yang tak kalah pentingnya untuk mendukung terlaksananya paket B dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan adalah pendataan para calon warga belajar. Dalam tahap pendataan calon warga belajar yang dilakukan oleh PKBM Diponegoro yaitu;

a. Mencari informasi siswa lulus SD atau yang sederajat dan tidak melanjutkan serta siswa putus SLTP pada usia 15 tahun ke atas yang diperoleh dari tokoh masyarakat (RT/RW/Lurah/Kades) setempat atau kepala sekolah setempat. Kemudian menghubungi calon warga belajar tersebut termasuk orangtua/wali guna memperoleh informasi tentang kesediaannya mengikuti paket B, serta memberi penjelasan tentang keberadaan dan tindak lanjut paket B.
b. Pendataan secara sukarela. Ada juga calon warga masyarakat yang datang dengan sendirinya untuk mengikuti paket B. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Muh. Khoirudin selaku ketua PKBM Diponegoro. Ada sekitar 15% calon warga masyarakat yang datang mendaftar untuk menjadi warga belajar paket B di PKBM Diponegoro (Wawancara dengan Bapak Muh. Khorudin Selaku Tutor Mata Pelajaran Matematika Paket B di PKBM Diponegoro, pada 2 Mei 2009). Dengan demikian, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menginginkan akan hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan tanpa harus didata/didatangi ke rumah mereka.

c. Sebagai pendukung proses pendataan, PKBM Diponegoro juga memasang papan pengumuman dan spanduk guna mempermudah masyarakat mengenai informasi tentang paket B yang dilaksanakan oleh PKBM Diponegoro.
d. Setelah proses tersebut di atas, kemudian bagi calon warga belajar yang berminat mengikuti paket B di PKBM Diponegoro mereka diminta untuk mengisi formulir yang telah disiapkan oleh petugas. Adapun data yang diperlukan dalam formulir tersebut antara lain;
   1) Nama jelas :
   2) Tempat, Tanggal lahir :
   3) Agama :
   4) Jenis kelamin :
   5) Pendidikan terakhir :
   6) Alamat :
   7) Orangtua :

Sesuai dengan perencanaan bahwa paket B ditujukan bagi warga masyarakat yang kurang beruntung salah satunya kurang beruntung dari segi ekonomi. Pendataan dalam jalur reguler dilakukan langsung oleh petugas dari PKBM Diponegoro dengan pendekatan *top-down* (dari atas ke bawah) bahwa dalam pembuatan kebijakan pencalonan warga belajar pada paket B lebih banyak ditentukan oleh pemikir kebijakan (tokoh masyarakat, RT, RW maupun perangkat desa) dibandingkan masyarakat. Artinya warga belajar yang memalui jalur reguler biasanya calon warga belajarnya sudah ditentukan oleh pengelola PKBM Diponegoro atas dasar rekomendasi dari tokoh masyarakat.

Sedangkan dalam jalur non reguler dengan menggunakan pendekatan *bottom-up* (dari bawah ke atas) yaitu adanya kesempatan masukan dan kebutuhan dari warga belajar yang

bersangkutan yang kemudian diusulkan kepada pihak penentu kebijakan (pemerintah). Artinya bahwa dalam jalur non reguler warga belajar memang betul-betul membutuhkan pelayanan pelaksanaan paket B karena mereka tidak lulus dalam ujian akhir di pendidikan formal. Sehingga mereka harus memiliki ijasah/ STL (Surat Tanda LULUS), Supaya mereka bisa melanjutkan pendidikanya pada tingkat SLTA.

3. Tahap Persiapan

Dalam pelaksanan paket B partisipasi warga belajar merupakan faktor terpenting dalam suatu persiapan program. Persiapan tanpa ada partisipasi warga belajar akan mengalami kegagalan. Partisipasi warga belajar bisa diterapkan dalam perencanaan program paket B karena perencanaan merupakan faktor utama tidak bisa dihilangkan dalam melaksanakan suatu program, artinya sebelum program kerja dilaksanakan, tutor/ pengajar dan warga belajar terlebih dahulu melakukan perencanaan bersama-sama.

Perencanaan pada program paket B dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi warga belajar yaitu dengan melakukan penjangkauan langsung ke anak putus sekolah untuk diajak berpartisipasi serta memberikan masukan jadwal pelaksanaan, penyamaan persepsi mengenai tujuan belajar dan tempat pembelajaran paket B.

Pada umumnya paket B memberikan pelayanan pendidikan dasar setara SLTP pada siswa lulus SD yang sederajat karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan ke SLTP dan siswa putus sekolah (DO) pada tingkat SLTP. Selain itu mendukung program pemerintah yaitu program wajib belajar pendidikan dasar setara SLTP (Wawancara dengan Bapak Muh. Khoirudin selaku ketua PKBM Diponegoro pada tanggal 2 Mei 2009).

Paket B merupakan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap warga belajar sehingga dapat memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang setara dengan lulusan SLTP. Tujuan pelayanan paket B di PKBM Diponegoro adalah menyelamatkan, melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, bagi anak yang mengalami putus sekolah khususnya bagi warga desa Maguwoharjo dan umumnya bagi warga penduduk di luar wilayah desa Maguwoharjo yang disebabkan faktor ekonomi maupun karena anaknya itu sendiri yang yang tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah formal.

Dengan harapan mereka tidak perlu terbebani oleh *image*, tetapi justru akan mendapatkan nilai plus bahwa mereka adalah yang bisa bekerja, bisa menempuh belajar sampai mengikuti ujian akhir nasional, sebagaimana layaknya siswa-siswa sekolah. Mereka tidak perlu minder di masyarakat, walau hanya lulus mengikuti program paket B, karena ini adalah setara SLTP, hanya karena faktor usia sehingga belajar mereka mengalami keterlambatan. Dengan harapan setelah mengikuti belajar selama tiga tahun, dan diikuti ujian akhir nasional mereka merasa bangga dan percaya diri untuk melakukan banyak hal di masyarakat, terutama untuk melamar pekerjaan maupun untuk mendaftar sekolah pada tingkat selanjutnya.

Kurikulum paket B terdiri dari kurikulum Nasional (inti) dan kurikulum lokal (muatan lokal). Kurikulum inti disusun oleh Direktorat Jendral PNF-I dan, pemuda dan olahraga Depdiknas, memuat kompentensi kabupaten/kota memuat kompetensi dasar ketrampilan bermata pencaharian yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi warga belajar. Modul paket B minimal terdiri dari:

a. Bahasa Indonesia
b. Matematika

c. IPS
d. IPA
e. Bahasa Inggris
f. PPKn
g. Pendidikan Agama Islam
h. Penjaskes
i. Ketrampilan Fungsional

Memenuhi standarisasi mutu, penentu materi pada bahan kajian, modul 1 s/d 6 menjadi tanggungiawab Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Pemuda (Direktorat Pendidikan Masyarakat). Bekerjasama dengan pusat Kurikulum Balitbang Diknas. Penentuan materi bahan kajian, modul 7 s/d 9 menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Untuk melaksanakan aktifitas pembelajaran paket B di atas, perlu adanya jadwal pelaksanaan pembelajaran. Dalam menentukan jadwal tutor/pengajar mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan pengurus PKBM Diponegoro serta warga belajar paket B PKBM Diponegoro. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa paket B merupakan pendidikan non formal yang memiliki waktu yang tidak pasti, karena pada umumnya waktu bukanlah jadwal yang mati.

Warga belajar rata-rata memiliki kesibukkan masing-masing, sehingga mereka memiliki jadwal yang pasti, tetapi setiap saat bisa berubah sesuai kesepakatan bersama maka jadwal disepakati untuk kelompok belajar paket B, karena ada dua kelompok maka tempat pembelajaran ada dua tempat. Kelompok I bertempat di SD Perumnas Condongcatur sedangkan jadwal pembelajaran bertepatan pada hari Ahad, Rabu dan Jum'at, waktu ba'da magrib sampai selesai. Kelompok II bertempat di SD Ringin Sari Maguwoharjo sedangkan jadwal pembelajaran bertepatan

pada hari Senin, Kamis dan Sabtu, waktu habis 16.00-selesai (Wawancara dengan Sudaryono Sebagai Pesena Paket B di PKBM Diponegoro Pada Tanggal 7 Mei 2009).

4. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran paket B dapat diartikan sebagai aktifitas bersama dengan warga belajar (WB) di bawah bimbingan seorang tutor dalam waktu tertentu sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Adapun kegiatan pembelajaran paket B di PKBM Diponegoro meliputi;

a. Pembelajaran

Berdasarkan hasil di lapangan bahwa PKBM Diponegoro dalam memberikan pelayanan paket B, ada dua jalur yaitu jalur reguler dan jalur non-reguler. Bagi warga belajar yang menempuh melalui jalur reguler maka proses pembelajaran paket B dilaksanakan selama tiga tahun dari kelas 1 s/d kelas 3 dengan didampingi para tutor sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya dengan menyesuaikan kurikulum di atas.

Sedangkan bagi warga belajar yang menempuh melalui jalur non-reguler maka proses pembelajaran hanya sebatas pendalaman materi ujian nasional untuk bekal nanti ketika mengikuti ujian nasional. Adapun jadwal pembelajaran adalah kesepakatan bersama antara warga belajar dengan tutor. Adapun daftar seluruh warga belajar paket B PKBM Diponegoro tahun ajaran 2007-2008 dapat terlihat pada tabel 4.2. sebagai berikut ini:

Tabel 4.2. Daftar Warga Belajar Paket B PKBM Diponegoro
Tahun 2007-2008

No	Nama	Nomor Induk	L/P	Daftar Tahun
1	Nandika Ratnaningsih	121	P	2007
2	Agus Purwanto	122	L	2007
3	Ngadiyono	123	L	2007
4	Aprinia Wardany	124	P	2007
5	Vivi Indah Larasati	125	P	2007
6	Novy Lucky Christina	126	P	2007
7	Udik Slamet	127	L	2007
8	Melisa Pratiwi	128	P	2007
9	Niko Dian Mahardhika	129	L	2007
10	Eko Foyan Andriyanto	130	L	2007
11	Eko Marlisetyo Hadi	131	L	2007
12	Neri Setyaningrum	132	P	2007
13	Nita Wulansari	133	P	2007
14	Angga Dwi Setya Purnama	134	L	2007
15	Hendra Nurcahya	135	L	2007
16	Saptanti Mujiasih	136	P	2007
17	Hafidz Firdiansyah	139	L	2007
18	Ahmad Muhaimin	140	L	2007
19	Atun Musyarrofah	141	P	2007
20	Dinar Mitasari	142	P	2007
21	Dwi Yantini	143	P	2007
22	Dwi Kurniasari	144	P	2007
23	Erna Fitriana	145	P	2007
24	Masruchan	146	L	2007
25	Nanang Kosim	147	L	2007

26	Nur Shodiq	148	L	2007
27	Koriyah	149	P	2007
28	Sodik	150	L	2007
29	Aisha Hanum	151	P	2007
30	Ratna Dewi Puspitasari	152	P	2007
31	Saptanti Mujiasih	153	P	2007
32	Marischa Indira Mahadianty	154	P	2007
33	Tomy Andono Kusuma	155	L	2007
34	Chatarina Wahyuning Mardiyani	156	P	2007
35	Desta Prasetyawati	157	P	2007
36	Nur Hargiyanti	158	P	2007
37	Catur Wulan Fitriani	159	P	2007
38	Cukup Agus Prasetyo	160	P	2007
39	Erna Septiani	161	P	2007
40	Rahmat Sumantoro	162	L	2007
41	Markus Prasetyo	163	L	2007
42	Wisnu Riyanto	164	L	2007
43	Wahyu Wibowo	165	L	2007
44	Banu Subekti	166	L	2007
45	Dwi Arifiyah Marfu'ah	167	P	2007
46	Elisa Yoga Widiastuti	168	P	2007

Sumber: Dokumentasi PKBM Diponegoro

b. Ujian Semester

Salah satu kegiatan yang menjadi rutinitas dalam proses pembelajaran yaitu dengan dilaksanakanya ujian semester. Ujian ini dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Ujian semester terdiri dari dua komponen yaitu ujian semester dan ujian akhir semester.

Guna memantau proses pembelajaran paket B, kemampuan yang telah dicapai, dan kemajuan hasil pembelajaran warga belajar selama enam bulan (satu semester), maka dilakukan penilaian hasil belajar oleh tutor (pengajar) secara berkesinambungan.

Sedangkan ujian semester dilaksanakan setelah satu tahun mereka mengikuti proses pembelajaran paket B dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran serta menentukan kenaikan kelas. Mereka mengerjakan soal-soal yang telah dipersiapkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal-Informal (PNF-I) dan, Pemuda dan Olahraga Depdiknas.

c. Ujian Akhir Semester

Dari hasil di langanan, setelah mereka terdaftar sebagai warga belajar paket B di PKBM Diponegoro, selanjutnya mereka mengikuti proses pembelajaran yang didampingi oleh para tutor (pengajar) yang berkompeten dibidang masing-masing mata pelajaran. Mereka diharuskan mengikuti proses pembelajaran selama 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3 bagi warga belajar yang menempuh jalur reguler dan pendalaman soal-soal ujian nasional selama satu minggu yang kemudian dilanjutkan mengikuti ujian nasional setara SLTP bagi warga belajar yang menempuh jalur non reguler. (Wawancara dengan Bapak. Khoirudin, Wiji Lestari selaku pengelola paket B PKBM Diponegoro pada tanggal 7 Mei 2009).

Bahan ujian pada saat mengikuti ujian nasional yang telah dipersiapkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal-Informal (PNF-I) dan, Pemuda dan Olahraga Depdiknas. Adapun mata pelajaran yang di ujikan pada ujian nasional di PKBM Diponegoro antara lain:

1) Bahasa Indonesia
2) Bahasa Inggris
3) Matematika

4) IPS

5) IPA dan

6) PPKn

Dengan demikian untuk memenuhi standarisasi mutu, maka soal-soal ujian nasional dipersiapkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal-Informal (PNF-I) dan Pemuda dan Olahraga Depdiknas. Sedangkan yang menetapkan sebagai pelaksanaan ujian nasional paket B pada PKBM Diponegoro adalah Dinas pendidikan kabupaten Yogyakarta.

Kriteria kelulusan paket B pada PKBM Diponegoro bahwa warga belajar/peserta ujian nasional dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan (Wawancara dengan Bapak. Khoirudin, Wiji Lestari selaku pengelola paket B PKBM Diponegoro pada tanggal 7 Mei 2009):

1) Mengikuti seluruh mata ujian dan memperoleh nilai sekurang- kurangnya 5,25 untuk setiap mata ujian.
2) Memiliki jumlah nilai dari seluruh mata ujian sekurang-kurangnya 4,00.

Peserta ujian nasional yang tidak memenuhi persyaratan butir a) di atas dinyatakan belum lulus dan dapat mengikuti ujian pada periode selanjutnya. Berikut daftar warga belajar paket B PKBM Diponegoro yang mengikuti ujian nasional sebagai berikut;

Tabel 4.3 Daftar Ujian Warga Belajar Paket B PKBM Diponegoro pada Tahun 2007-2008

No	Nama	Nomor Induk	L/P	Daftar Tahun
1	Nandika Ratnaningsih	121	P	2007
2	Agus Purwanto	122	L	2007
3	Ngadiyono	123	L	2007

4	Aprinia Wardany	124	P	2007
5	Vivi Indah Larasati	125	P	2007
6	Novy Lucky Christina	126	P	2007
7	Udik Slamet	127	L	2007
8	Melisa Pratiwi	128	P	2007
9	Niko Dian Mahardhika	129	L	2007
10	Eko Foyan Andriyanto	130	L	2007
11	Eko Marlisetyo Hadi	131	L	2007
12	Neri Setyaningrum	132	P	2007
13	Nita Wulansari	133	P	2007
14	Angga Dwi Setya Purnama	134	L	2007
15	Hendra Nurcahya	135	L	2007
16	Saptanti Mujiasih	136	P	2007
17	Hafidz Firdiansyah	139	L	2007
18	Ahmad Muhaimin	140	L	2007
19	Atun Musyarrofah	141	P	2007
20	Dinar Mitasari	142	P	2007
21	Dwi Yantini	143	P	2007
22	Dwi Kurniasari	144	P	2007
23	Erna Fitriana	145	P	2007
24	Masruchan	146	L	2007
25	Nanang Kosim	147	L	2007
26	Nur Shodiq	148	L	2007
27	Koriyah	149	P	2007
28	Sodik	150	L	2007
29	Aisha Hanum	151	P	2007
30	Ratna Dewi Puspitasari	152	P	2007
31	Saptanti Mujiasih	153	P	2007
32	Marischa Indira Mahadianty	154	P	2007

33	Tomy Andono Kusuma	155	L	2007
34	Chatarina Wahyuning Mardiyani	156	P	2007
35	Desta Prasetyawati	157	P	2007
36	Nur Hargiyanti	158	P	2007
37	Catur Wulan Fitriani	159	P	2007
38	Cukup Agus Prasetyo	160	P	2007
39	Erna Septiani	161	P	2007
40	Rahmat Sumantoro	162	L	2007
41	Markus Prasetyo	163	L	2007
42	Wisnu Riyanto	164	L	2007
43	Wahyu Wibowo	165	L	2007
44	Banu Subekti	166	L	2007
45	Dwi Arifiyah Marfu'ah	167	P	2007
46	Elisa Yoga Widiastuti	168	P	2007

Sumber: Dokumentasi PKBM Diponegoro

Dari data yang ada bahwa hasil ujian pada tahun pelajaran 2007-2008 masih ada warga belajar yang belum lulus dalam mengikuti ujian nasional. Hal ini disebabkan nilai mereka belum mencukupi nilai standar minimal. Sebagaimana yang dituturkan oleh saudara Sudaryono yaitu sebagai warga belajar yang dinyatakan belum lulus pada tahun ajaran 2007-2008 adalah sebagai berikut:

> "Saya belum lulus ikut ujian karena standar nilainya sangat tinggi apalagi soal ujian nasional banyak yang sulit, ditambah lagi soal mata pelajaran bahasa Inggris ndak dong saya. Saya lupa jumlah nilainya berapa, yang jelas nilai saya kuarng dari 4,00" (Wawancara dengan Sudaryono Sebagai Peserta Paket B di PKBM Diponegoro pada Tanggal 7 Mei 2009)

Dari pernyataan di atas tampak jelas bahwa masih ada warga belajar yang belum mampu memperoleh standar nilai yang telah ditetapkan di atas. Akan tetapi bagi peserta ujian nasional yang belum lulus masih bisa mengikuti ujian lagi pada pedode selanjutnya.

d. Penetapan Kelulusan

Kelulusan merupakan harapan yang ditunggu-tunggu oleh semua warga. Peserta ujian paket B di PKBM Diponegoro yang dinyatakan lulus ujian akan dinyatakan berdasarkan hasil yang tertera pada Daftar Nilai Hasil Ujian (DNHUN) yang kemudian warga belajar tersebut akan memperoleh Surat Tanda Lulus (STL) yang ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan Provinsi Yogyakarta.

Dari data yang ada, pada tahun ajaran 2007-2008 paket B di PKBM Diponegoro masih ada warga belajar yang belum bisa memperoleh STL, karena dinyatakan belum lulus ujian nasional pada tahun ajaran 2007-2008. Berikut ini tabel warga belajar yang dinyatakan lulus dan memperoleh Surat Tanda Lulus (STL) paket B di PKBM Diponegoro adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Daftar Warga Belajar Paket B PKBM Diponegoro yang dinyatakan lulus pada Tahun 2007-2008

No	Nama	Nomor Induk	L/P	Daftar Tahun
1	Nur Hargiyanti	158	P	2007
2	Catur Wulan Fitriani	159	P	2007
3	Cukup Agus Prasetyo	160	P	2007
4	Erna Septiani	161	P	2007
5	Rahmat Sumantoro	162	L	2007
6	Markus Prasetyo	163	L	2007
7	Wisnu Riyanto	164	L	2007

8	Wahyu Wibowo	165	L	2007
9	Banu Subekti	166	L	2007
10	Dwi Arifiyah Marfu'ah	167	P	2007
11	Elisa Yoga Widiastuti	168	P	2007

Sumber : Dokumentasi PKBM Diponegoro

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa warga belajar atau sekitar 76%, warga belajar yang belum bisa naik pada tingkat pendidikan selanjutnya. Angka yang cukup memprihatinkan dari keseluruhan warga belajar yang mengikuti ujian tahun 2007-2008 yang lulus hanya 11 warga belajar. Artinya, warga belajar yang ditetapkan belum lulus sehingga mereka harus mengulang kembali pada periode berikutnya guna memperoleh STL paket B di PKBM Diponegoro.

Menurut pengamatan penulis, dari sekian warga belajar yang dinyatakan lulus yang kemudian diberi STL. STL tersebut bisa digunakan untuk mendaftar sekolah pada tingkat selanjutnya baik pada SLTA, pada kesetaraan paket C dan juga bisa untuk mendaftar kerja. Menurut penuturan ibu Wiji Lestari bagi warga belajar yang dinyatakan lulus, biasanya mereka langsung didaftarkan pada paket C di PKBM Diponegoro. Hal ini tentunya ada kesepakatan antara warga belajar yang bersangkutan yang hendak melanjutkan pada paket C. Namun, ada juga warga belajar yang memilih sendiri untuk melanjutkan pada SLTA, karena mereka memperoleh nilai yang bagus sehingga ia bisa diterima di sekolah negeri (Wawancara dengan Ibu Wiji Lestari Selaku TU/Administrasi Paket B di PKBM Diponegoro Pada Tanggal 20 Juni 2009).

5. Tahap Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan oleh pengelola paket B di PKBM Diponegono dilakukan perbulan dan evaluasi tahunan program paket B, yaitu:

a. Evaluasi formatif, pada tiap bulan dalam tahun program paket B, yaitu untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan paket B dengan format yang tertuang dalam dokumen paket B. Hasil evaluasi akan menghasilkan rekomendasi bagi pelaksanaan pelayanan paket B berikutnya.
b. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir tahun program paket B, biasanya pada bulan Desember setiap tahun.

B. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya

Dari pengamatan penulis, diketahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program paket B sebagai pelayanan anak putus sekolah. Kendala tersebut muncul dalam proses pelaksanan program dan jika tidak segera diatasi akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Anak putus sekolah yang menjadi warga belajar paket B di PKBM Diponegoro memiliki masalah yang berhubungan dengan penyesuaian diri. Penyesuaian diri yang dimaksud adalah dalam hal pelaksanaan proses pelayanan paket B. Hal tersebut dapat dikatakan kendala, karena penyesuaian diri tidak semudah dibayangkan, hal tersebut membutuhkan proses yaitu melalui pembelajaran.

Kendala proses pelaksanaan paket B dapat dialami oleh siapa saja. Penulis ingin menjelaskan faktor yang menyebabkan kendala pada paket B yang dilaksanakan oleh PKBM Diponegoro. Mereka mengalami kendala yang berhubungan dengan proses kelangsungan pembelajaran paket B. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa masalah yang tidak mendukung berlangsungnya proses pembelajaran, sehingga proses pelayanan paket B kurang

berjalan begitu lancar, bahkan terhambat. Adapun kendala-kendala dalam pelakasanaan paket B adalah sebagai berikut;

1. Kendala Kurang Dukungan Sosial-Ekonomi Warga Belajar

Jumlah warga belajar paket B yang dijadikan tempat penelitian, saat ini secara administrasi masih tercatat sebagai warga balajar adalah 46 orang di tahun ajaran 2007-2008, yang saat ini duduk di kelas VIII dan IX (Wawancara dengan pengelola paket B PKBM Diponegoro, Tanggal 7 Mei 2009). Menurut hasil di lapangan bahwa hampir seluruh peserta kegiatan belajar paket B Diponegoro berlatar belakang pendidikan SD dan madrasah, dan mereka mengikuti kegiatan belajar tersebut karena kondisi ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ponijo sebagai koordinator pengelola paket B adalah sebagai berikut:

> "Kalau dilihat dari peserta yang waktu mendaftar atau waktu di data sebagai peserta paket B, mereka adalah anak dari keluarga yang mata penghasilannya masih kurang. Biasanya orangtua mereka memiliki penghasilan yang tidak tetap dan masih kurang mencukupi kebutuhan hidupnya" (Wawancara dengan pengelola paket B PKBM Diponegoro, Tanggal 7 Mei 2009)

Dari pernyataan tersebut, pengelola paket B sering menjumpai sewaktu warga masyarakat mendaftarkan diri sebagai calon warga belajar paket B adalah dari keluarga kurang mampu dalam bidang ekonomi. Tak lain juga diungkapkan oleh Mardono sebagai warga belajar paket B adalah sebagai berikut;

> "Saya sering mbolos mengikuti pembelajaran paket B mbak, karena saya harus mbantu mencari nafkah orangtua. Jika saya tidak membantu mencari uang

kasihan keluarga saya, untuk makan sehari-hari saja susah apalagi orangtua saya bekerja sebagai buruh tani jadi penghasilanya ya musiman" (Wawancara dengan Mardono, Slamet, Dwi, Erna sebagi peserta paket B PKBM Diponegoro Tanggal 7 Mei 2009).

Pernyataan di atas merupakan warga belajar secara ekonomi dalam keluarganya masih kurang, atau status ekonomi kurang beruntung, berasal dari keluarga miskin dan pekerjaan orangtua sebagai buruh tani dan atau bekerja pada sektor yang tidak tetap. Dengan demikian, seringnya warga belajar yang sering membolos yang dikarenakan lebih mengutamakan ekonomi keluarga daripada mencari ilmu untuk bekal selanjutnya. Dukungan orangtua maupun warga sekitar sangat berpengaruh pada proses keberhasilan dalam pelayanan pembelajaran paket B di PKBM Diponegoro.

2. Kendala Bersumber dari Warga Belajar Paket B

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran paket B adalah yang ditunjuk untuk berperan sebagai koordinator dan sekaligus sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yaitu tutor. Tutor ini semua berasal dari guru SLTP Diponegoro dan hampir semua tutor tersebut adalah pengelola PKBM Diponegoro. Pendidikan para tutor sebagian besar adalah sarjana (S-1) dan sebagian kecil Magister (S-2). Umumnya mereka menjadi pengelola minimal sudah lima tahun dan sebagian besar sudah pernah mengikuti beberapa kegiatan penataran/pelatihan yang dilakukan untuk tutor atau pembelajaran pada kelompok belajar.

Sementara itu, para tutor yang bergabung dalam kegiatan belajar paket B mempunyai latar belakang sebagai guru SLTP. Para tutor ikut terlibat dalam kegiatan belajar paket B karena berbagai alasan di antaranya: a). sebagai jam tambahan dalam tugas menjadi guru di sekolahan, karena dalam pendidikan formal setiap guru

wajib mengampu/mengajar selama 24 jam dalam seminggunya, b) memiliki kepedulian terhadap masalah pendidikan, c) ingin memajukan rakyat di desa Maguwoharjo melalui pendidikan, dan d). dianggap sebagai pengabdian kepada masyarakat. Diakui oleh tutor mata pelajaran IPA pada paket B bahwa memang hingga saat ini masih menjadi tutor paket B di PKBM Diponegoro, berikut penuturannya:

> "Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini saya masih menjadi tutor di paket B dengan alasan: pertama, saya merasa senang karena sudah terbiasa ngajar di sekolah formal. Kedua, saya merasa senang bisa membantu warga dalam belajar (pendidikan). Ketiga saya sudah merasa akrab dengan warga belajar" (Wawancara dengan Siti Fatonah Tutor Mata Pelajaran IPA pada Paket B PKBM Diponegoro, tanggal 7 Mei 2009).

Bagi para pengelola, sebagian besar merasa siap mendapatkan tugas untuk memberikan pelayanan kegiatan belajar. Namun menurut mereka, seringkali dalam melakukan pelayanan menemukan berbagai kendala yang tidak ringan dalam memotivasi warga belajar untuk terlibat dalam kegiatan. Sementara bagi tutor, mengakui bahwa setiap mereka akan melakukan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik, meskipun seringkali materi yang dipersiapkan secara matang tersebut kurang mendapat perhatian dari warga belajar. Hal ini terjadi karena, menurut tutor bahwa motivasi warga belajar umumnya sangat rendah dibandingkan sekolah-sekolah formal.

Menurut penulis, ada beberapa kendala yang berasal dari individu warga belajar dalam pelayanan paket B pada PKBM Diponegoro, antara lain:

a. Kurang minat terhadap paket B

Setiap warga balajar paket B pada PKBM Diponegoro hendaknya mempunyai minat yang tinggi terhadap paket B. Begitu juga sebaliknya apabila minat seseorang terkurang dalam suatu proses pembelajaran, maka akan menyebabkan kurangnya perhatian dan usaha belajar sehingga menghambat proses pelaksanaan paket B. Keadaan kurang minat ini bisa dari warga itu sendiri. Sebagaimana penuturan warga belajar yang kurang serius dalam mengikuti pembelajaran paket B ini adalah sebagai berikut:

> "Saya ikut paket B hanya ingin mendapatkan sertifikat saja. Kalau dapat ya alhamdulillah tapi kalau gak dapat ya gak apa-apa yang penting saya sudah daftar, tapi kalau disuruh masuk kelas males mending untuk bekerja" (Wawancara dengan Mardono, Slamet, Agus dan Tomy sebagai peserta paket B PKBM Diponegoro Tanggal 7 Mei 2009).

Dengan demikian, hal ini bukan semata-mata penyelenggara yang salah, akan tetapi di mata warga belajar paket B memang kurang tertarik dengan paket B dikarenakan warga belajar bercermin pada masyarakat di sekitarnya bahwa banyak dari kalangan mereka yang sekolah toh masih juga menganggur di rumah. Kalau dicermati memang ada masalah motivasi pada diri warga masyarakat untuk suka rela mengikuti program ini karena masyarakat masih berfikir pragmatis, untuk apa ikut progam paket jika tidak ada hasil yang segera dapat dinikmati.

b. Tidak mempunyai tujuan yang jelas

Warga belajar yang mengikuti paket B pada PKBM Diponegoro beranggapan bahwa mengikuti paket B hanya sekedar membuang waktu. Lebih lanjut ada juga yang beranggapan bahwa proses pengelolaan paket B hanya untuk mengisi waktu luang saja.

Bahkan ada yang mengatakan bahwa mengikuti paket B hanya menambah teman (Wawancara dengan Slamet salah seorang warga belajar Paket B pada PKBM Diponegoro pada tanggal 20 Mei 2009). Pendapat tersebut sudah jelas bahwa mengikuti paket B tidak memiliki tujuan yang jelas yang akan mendorong kemajuan mereka. Tujuan yang tidak jelas dan tidak realistis, juga akan menjadi penghalang kemajuan pelaksanaan paket B pada PKBM Diponegoro. Bukan kemajuan atau keberhasilan yang akan dicapainya melainkan kegagalan dan kekecewaan yang akan diperolehnya.

c. Kecakapan dalam mengikuti proses pembelajaran paket B

Penulis cenderung berpendapat bahwa cakap dalam mengikuti proses pebelajaran adalah apabila mengerti dan memahami apa yang diterangkan oleh tutor (pengajar) kemudian mengembangkan untuk menambah pengetahuan yang lebih luas. Namun faktanya, warga belajar pada PKBM Diponegoro mempunyai kendala dalam hal kecakapan, mereka lebih cenderung pasif atau diam di dalam kelas. Karena faktor usia, sebagian mereka telah berusia 20 tahun, selain itu mereka tidak memiliki modal dan kesiapan mental.

> "Mbak, kebanyakan warga belajar dalam mengikuti pembelajaran jarang sekali menulis hal-hal yang penting, apalagi bertanya jika mereka kurang paham" (Wawancara dengan Siti Fatonah Tutor Mata Pelajaran IPA pada Paket B PKBM Diponegoro, tanggal 7 Mei 2009).

Warga belajar PKBM Diponegoro sebenarnya dapat mengerti dan memahami isi dari proses pembelajaran paket B dengan baik apabila mengikuti dengan baik. Seperti bisa terkonsentrasi, mencatat hal-hal yang fokus untuk dipelajari ulang, menanggapi

secara kritis apa yang dibahas dalam proses belajar paket B dan sebelum mengikuti proses belajar telah mempelajarinya terlebih dahulu pokok yang akan disampaikan oleh tutor (pengajar). Seseorang yang terus-menerus mengikuti proses pembelajaran paket B belum tentu dianggap pandai. Tetapi kegagalan atau hambatan dalam kemajuan belajar seringkali disebabkan karena warga belajar kurang cakap dalam mengikuti proses pelaksanaan pembelajaran paket B.

d. Masalah Waktu

Waktu merupakan kendala utama dalam proses pelaksanaan paket B pada PKBM Diponegoro. Hal ini disebabkan warga belajar paket B tidak diimbangi antara waktu mengikuti pelaksanaan paket B dengan mencari nafkah. Sebagian dari mereka cenderung banyak menghabiskan waktu untuk bekerja mencari nafkah tambahan untuk orang tuanya atau mereka bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Sebab warga belajar ada yang sudah berkeluarga sehingga mereka mempunyai tanggung jawab untuk keluarganya.

Kalau dilihat dari segi kebutuhan, sebenarnya sama penting. Namun apabila tidak mengikuti pelaksanaan pembelajaran paket B sangat rugi, karena mereka telah kehilangan ilmu dan wawasan. Tentang waktu ini, sebenarnya tutor sudah mengadakan kesepakatan dengan warga belajar pada hari, jam yang telah ditentukan bersama-sama akan tetapi warga belajar ada juga yang tidak datang atau yang hadir hanya beberapa persen dengan alasan mereka harus bekerja (Wawancara dengan Jamhari Tutor Mata Pelajaran IPS pada Paket B PKBM Diponegoro tanggal 7 Mei 2009).

Kehadiran sangat menentukan proses keberhasilan pembelajaran paket B, apabila mereka sering tidak hadir maka mempengaruhi keberhasilan UAN untuk mencapai kelulusan

paket B. Penggunaan waktu yang tidak sistematis tersebut menimbulkan munculnya kendala dalam program paket B pada PKBM Diponegoro. Warga belajar yang merasa kesulitan dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran paket B dikarenakan mereka lebih mementingkan bekerja untuk keluarga.

3. Kendala pada Kurikulum Paket B

Terkait dengan kurikulum, dalam realitasnya ditemukan kendala yaitu materinya masih bersifat umum. Materi belajar paket B yang diberikan secara umum mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan, yaitu dengan menggunakan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan tingkat kesetaraan dari setiap mata pelajaran. Menurut para pengelola, tutor, dan warga belajar paket B pada PKBM Diponegoro, bahwa materi tersebut belum menyentuh kehidupan warga belajar. Artinya sangat sedikit bila dikaitkan dengan kebutuhan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Materi yang diberikan lebih banyak bersifat pengetahuan dibandingkan keterampilan untuk memecahkan masalah kehidupan warga belajar, dan tidak kongruen dengan kondisi daerah di mana warga belajar berada.

Bila dikaitkan dengan dunia kerja mereka, umumnya *skope* dan lingkup, serta isi kurikulum juga tidak kongruen. Hal ini disebabkan sebagian besar warga belajar, bekerja membantu orang tua sebagai buruh, tani, atau pekerjaan kasar lainnya. Padahal pekerjaan ini tidak menggunakan keterampilan-keterampilan khusus seperti berbahasa Inggris, matematika dan sebagainya. Akibatnya, warga belajar sesudah belajar seakan-akan tidak memperoleh sesuatu yang berguna dalam membantu memecahkan masalah kehidupannya, kecuali hanya sekedar mendapatkan tambahan pengetahuan yang dianggap kurang bermakna dalam hidup.

Kegiatan belajar ini adalah sebagai upaya penyetaraan dengan SLTP konvensional. Namun demikian, menurut para tutor dan pengelola paket B pada PKBM Diponegoro, bahwa akan sulit dan bahkan tidak mungkin pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh warga belajar bisa setara dengan yang diperoleh oleh siswa SLTP konvensional. Hal ini terjadi karena: 1) bahan belajar yang diberikan secara kualitas maupun kuantitas jauh lebih rendah dibandingkan SLTP konvensional, meskipun banyak para tutor yang mencoba menggunakan buku pendamping modul untuk kegiatan pembelajaran, 2) waktu belajar di kelas yang digunakan oleh warga belajar sangat terbatas, dan bahkan tidak lebih dari seperempat waktu belajar di SLTP konvensional, meskipun diberi modul yang secara umum tidak pernah dipelajari oleh warga belajar, dan 3) sistem belajar, kedisiplinan, sarana, tutor, dan motivasi belajar dianggap kurang kondusif, termasuk sistem evaluasi yang digunakan untuk melihat keberhasilan belajar.

Atas dasar asumsi-asumsi tersebut, pengelola, tutor, dan penyelenggara bersikap pesimis terhadap apa yang hendak diharapkan dari kegiatan belajar paket B, terutama bila dikaitkan dengan pemecahan masalah hidup dan kehidupan.

4. Kendala dan dukungan Sarana-Prasarana

Potensi sarana belajar paket B seperti buku pelajaran, buku paket, dan buku modul, serta buku paket penunjang bila dilihat dari segi kuantitas hampir di semua tempat kegiatan belajar, terlihat cukup dibandingkan jumlah warga belajar. Akan tetapi secara kualitas menurut para tutor, pengelola dan penyelenggara dianggap kurang memadai, oleh karena itu seringkali para tutor mencari buku-buku sendiri sebagai pendamping yang dianggap memiliki kualitas yang memadai.

Namun dalam hal ini muncul persoalan baru, karena warga belajar akan mengalami kesulitan dalam proses belajar. Sarana lain seperti alat-alat peraga, teramati tidak banyak para tutor menggunakan alat peraga, karena alat peraga yang ada sangat terbatas untuk bidang studi dan pokok bahasan tertentu. Kenyataan ini menjadi masalah tersendiri bila dikaitkan dengan proses pembelajaran yang berlangsung.

Sarana perpustakaan dan laboratorium, pada semua kelompok belajar tidak ada. Walaupun PKBM Diponegoro memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM), hanya berupa beberapa buku yang terkait dengan kegiatan belajar paket B yang tersimpan dalam satu-dua almari khusus, yang terlihat kurang dimanfaatkan oleh warga belajar. Prasarana seperti papan tulis, kapur, penghapus, bangku, kursi, menumt pengamatan penulis, tidak menjadi masalah artinya cukup memadai, karena sarana ini telah dipinjami oleh sekolah setempat.

5. Kendala dalam Proses Pembelajaran Paket B

Sebelum melakukan proses kegiatan belajar, para tutor sebagian besar menyatakan telah siap. Meskipun persiapan-persiapan tersebut tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembelajaran seperti pembuatan satuan pelajaran dan rencana pelajaran (SP dan RP) seperti sekolah konvensional. Rata-rata proses belajar dilaksanakan tiga kali seminggu. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagian tutor dan pengelola kegiatan belajar, menyatakan kan bahwa proses belajar yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan rencana dan bahkan sebagian menyatakan bahwa kegiatan belajar pekat B ini seringkali terjadi kemacetan karena warga belajar tidak hadir. Bahkan ada beberapa kelompok belajar paket B yang saat ini hanya tinggal nama, karena aktivitas belajar sudah tidak ada.

Sistem pembelajaran dilakukan sebagaimana belajar di sekolah, yaitu sistem belajar klasikal, karena belajar dengan cara berkelompok tidak bisa berjalan. Pembelajaran dilakukan kurang lebih 2-3 jam setiap pertemuan dengan materi pelajaran sesuai jadual. Namun serigkali terjadi materi pelajaran yang diberikan berubah-ubah bersamaan dengan ketidaksesuaian tutor yang seharusnya mengajar materi tersebut.

Pembelajaran pada paket B ini diakui oleh semua tutor sulit dilaksanakan secara maksimal, dan hal ini terjadi karena: 1) warga belajar yang hadir rata-rata tidak lebih dari 50%, 2) warga belajar yang datang memiliki motivasi belajar yang rendah, (3) warga belajar sulit menerima materi pelajaran yang diberikan, terutama materi seperti IPA, bahasa Inggris, dan Matematika.

Metode yang digunakan tutor dalam proses pembelajaran secara umum masih konvensional, yaitu dengan ceramah. Sementara itu, belajar dengan sistem modul sulit untuk berjalan, meskipun modul yang tersedia cukup. Penggunaan metode ini dilakukan, menurut tutor dan pengelola, karena sebagian besar tutor berasal dari guru sekolah formal (guru SD dan SLTP). Sehingga belum banyak mengenal metode-metode pembelajaran yang sering diterapkan pada pendidikan luar sekolah.

Hal ini menunjukkan bahwa para tutor dan pengelola tidak memahami praktek-praktek pembelajaran pada pendidikan luar sekolah. Kenyataan ini terjadi karena menurut pengakuan sebagian tutor bahwa mereka belum pemah dilakukan pelatihan atau penataran dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di luar sekolah. Mereka terlibat sebagai tutor belajar paket B karena merasa prihatin terhadap warga sekitar yang tidak sempat

menikmati pendidikan di sekolah formal karena berbagai faktor. Beberapa faktornya antara lain: faktor ekonorni, geografi, dan ketiadaan sekolah formal yang terjangkau.

Selama proses belajar berlangsung, menurut pengamatan penulis para tutor tidak pernah menggunakan alat peraga yang kondusif, kecuali sarana papan tulis dan kapur tulis. Hal ini terjadi karena menurut tutor, tidak tersedia alat peraga yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Hal ini terjadi, menurut para tutor dan pengelola, karena tidak ada bantuan baik dana maupun alat peraga dari pihak-pihak yang terkait. Sementara itu, peserta belajar kelompok belajar paket B tidak dimintai sumbangan apapun untuk kegiatan pembelajaran.

6. Kendala dalam Proses Perekrutan Warga Belajar

Sistem perekrutan warga belajar yang dilakukan oleh PKBM Diponegoro dengan beberapa cara secara simultan yaitu: 1) bekerjasama dengan aparat desa untuk mengidentifikasi warga desa yang tidak melanjutkan sekolah SLTP atau SLTP terbuka, dan/atau warga desa yang telah putus sekolah pada tingkat SLTP, 2) menyebarkan informasi melalui kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di pedesaan, seperti organisasi PKK, tentang keberadaan kelompok belajar paket B.

Dalam perekrutan tersebut tidak ada sistem pemaksaan kepada calon warga belajar. Namun upaya persuasif memang diakui oleh beberapa petugas yang melakukan perekrutan. Sementara untuk para tutor direkrut dengan menggunakan berbagai cara yaitu: 1) petugas pendidikan masyarakat tingkat kecamatan berkonsultasi dengan Dinas Diknas tingkat kecamatan untuk dimintai penimbangan guna menentukan/menetapkan para guru atau warga masyarakat yang akan direkrut menjadi tutor dan sekaligus untuk menetapkan pengelolanya; 2) menghubungi

secara langsung calon-calon tutor, khususnya warga desa setempat untuk membantu pelaksanaan kelompok belajar paket B.

Penentuan waktu belajar ditentukan secara bersama antara pengelola, tutor, dan sebagian warga bélajar dan kemudian konsultasi dengan penilik Dikmas kecamatan. Dalam hal ini tidak menjadi masalah karena yang terpenting harus diambil kesepakatan secara bersama. Secara umum kegiatan belajar terjadwal di sore hari, dan dilakukan tiga kali seminggu.

Setiap kali pertemuan sekitar 3 sampai 4 jam pelajaran dan bahkan ada yang lebih dari 4 jam pelajaran, dan setiap jam pelajaran rata-rata menggunakan waktu antara 45-50 menit. Namun realita yang ada bahwa kegiatan belajar sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi menurut informan karena warga belajar: (1) sibuk dengan urusan masing- masing, (2) kurang termotivasi dengan materi yang diberikan, dan (3) minat warga belajar untuk belajar rendah.

Penentuan tempat belajar didiskusikan bersama, khususnya oleh tutor, penyelenggara, dan pengelola. Dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan yang diutamakan adalah pertimbangan kemampuan daya tampung, kelengkapan fasilitas belajar, penerangan, mudah dijangkau. Menurut pengamatan yang ada bahwa tempat belajar hampir semua dilaksanakan di gedung SD pada sore hari dan sekaligus menggunakan berbagai fasilitas yang memungkinkan.

Sewaktu proses perekrutan, calon warga belajar tidak dikenakan biaya apapun. Sedangkan untuk para tutor, menurut beberapa informan, mendapatkan sekedar uang beli bensin sekitar Rp 50.000,- setiap bulan, dan diterimakan minimal dalam triwulan sekali (Wawancara dengan Siti Fatonah Tutor Mata Pelajaran IPA Paket B PKBM Diponegoro Tanggal 7 Mei 2009).

7. Kendala dan Dukungan Sistem Supervisi, Pelaporan, Evaluasi, dan Monitoring

Sistem supervisi yang dilakukan dalam kegiatan belajar paket B pada PKBM Diponegoro meliputi beberapa hal, yaitu supervisi administratif, dan edukatif. Supervisi adminstratif dan edukatif ditujukan pada program secara umum, warga belajar, tutor, sarana dan prasarana serta dana penyelenggaraan belajar.

Pelaksanaan supervisi bidang-bidang tersebut, menurut para pengelola, tutor, dan warga belajar jarang dilakukan oleh petugas yang terkait. Petugas yang biasanya datang memberikan supervisi hanya dari petugas pendidikan masyarakat Depdiknas kecamatan Depok. Sedangkan penilik diknas pendidikan Kabupaten Sleman dan dinas pendidikan Propinsi hampir sangat jarang, dan kira-kira setahun sekali (Wawancara dengan pengelola Paket B PKBM Diponegoro Tanggal 7 Mei 2009).

Sistem supervisi yang dilakukan secara lazim hanya melakukan kunjungan ke lokasi pelaksanaan kegiatan. Bentuk-bentuk lain seperti, tes dadakan pada warga belajar, konferensi kasus, dan angket belum pernah dilakukan oleh petugas. Materi supervisi terkait dengan program-program kegiatan belajar, masalah pengelolaan kegiatan belajar, dan rnasalah-masalah yang terkait dengan warga belajar. Satu hal yang sampai kini belum bisa dipecahkan oleh supervisor adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan kesadaran warga belajar agar mau belajar dengan rajin, tekun, dan atau setidaknya bisa belajar sampai berakhir kegiatan atau sampai bisa mengikuti ujian akhir. Sampai saat ini, semua pihak yang terkait dengan pengelolaan kegiatan belajar merasa kesulitan untuk mengatasinya, sehingga tidak sedikit warga belajar yang berhenti sebelum sampai ke tujuan akhir.

Sistem monitoring yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten selama ini dirasakan oleh semua petugas kegiatan belajar di lapangan sangat terbatas. Monitoring biasa hanya dilakukan dalam bentuk laporan bulanan. Monitoring juga dilakukan dengan sesekali petugas meninjau ke lokasi kegiatan belajar. Namun demikian, cukup jarang dilakukan pertemuan-pertemuan secara khusus dengan sesama petugas (pengelola, tutor, penyelenggara) dalam satu wilayah tingkat II atau tingkat I guna mambahas persoalan-persoalan yang dihadapi dalam mengelola kegiatan belajar Paket B. Akibat dari semua itu, menurut para petugas, banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan ada kecenderungan masing-masing pengelola kegiatan belajar dengan menggunakan pola sendiri-sendiri dalam menjalankan kegiatan belajar paket B pada PKBM Diponegoro.

Sistem evaluasi yang selama ini diterapkan dan yang diperhatikan hanya cenderung pada evaluasi hasil belajar, dan ini pun dilakukan dalam bentuk tes tertulis. Sementara evaluasi penyelenggaraan kegiatan, terutama yang terkait dengan warga belajar, tutor, fasilitator, penyelenggara, kesesuaian bahan belajar, keefektifan buku modul, buku pelengkap yang digunakan, serta proses belajar pembelajaran, menurut semua penyelenggara terabaikan. Dengan kata lain, belum pernah diselenggarakan secara terfokus oleh pihak-pihak yang terkait (Depdiknas). Jika ada bentuk evaluasi tersebut hanya bersifat pereferial yang tidak ubahnya seperti pada aktifitas supervisi dan monitoring.

Sistem pelaporan kegiatan belajar paket B seharusnya dilakukan secara berjenjang. Pelaporan berjenjang ini yaitu laporan kemajuan belajar warga belajar disusun tutor disampaikan pada penyelenggara dan pengelola. Selanjutnya dilaporkan ke penilik pendidikan masyarakat dari dinas kecamatan. Dari penilik

tingkat kecamatan dirangkum kemudian dilaporkan pada penilik pendidikan masyarakat tingkat kabupaten. Begitu seterusnya hingga laporan sampai ke tingkat propinsi. Semua laporan tersebut harus dilaporkan setiap bulan sekali.

Namun demikian, kenyataan yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa hampir semua level tidak pernah melaporkan kegiatan sesuai jadual yang ditetapkan. Bahkan tidak sedikit laporan baru diberikan pada tiga bulan atau empat bulan sekali bahkan ada yang setahun sekali. Jika ditelusuri, tentang letak keterlambatan laporan, terdapat berbagai alasan yang dikemukakan diantaranya, dari pihak yang lebih atas berargumen karena keterlambatan dari pihak bawah. Sementara pada level yang paling bawah mengakui, bahwa tidak selamanya laporan diberikan terlambat, dan jika ada yang terlambat dikarenakan faktor teknis, terlupakan, dan ada yang menyatakan karena kesibukan dengan pekerjaan lain.

Inilah beberapa kendala yang diakui masih ada dalam penyelenggaraan kegiatan belajar paket B untuk mengatasi masalah anak putus sekolah. Salah satu tujuan penulis mengungkapkan berbagai kendala tersebut adalah supaya kendala yang sama bisa diatasi pada penyelenggaraan paket B untuk mengatasi masalah anak putus sekolah. Sehingga masalah anak putus sekolah dapat diatasi dengan baik demi masa depan yang lebih baik dari anak-anak di Indonesia. Beberapa kekurangan dari pelaksanaan program ini diharapkan juga dapat menjadi pembelajaran untuk mengadakan kegiatan yang lebih baik di tempat lainnya. Penulis berharap, pelaksanaan program paket B dapat dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan terhadap anak putus sekolah di Indonesia.

BAB VI
PENUTUP

Banyak pelajaran yang bisa diambil dari program pelayanan Paket B oleh PKBM Diponegoro terkait anak putus sekolah ini. Penulis berharap buku ini dapat menjadi semacam pembelajaran terhadap program yang sama. Pelaksanaan program yang sudah baik dapat dilanjutkan sedangkan yang kurang baik dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk perbaikan agar tidak terulang kembali. Hal ini dalam rangka terciptanya program yang ideal untuk menyelamatkan anak putus sekolah di Indonesia, demi masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, bahwa pelayanan paket B di PKBM Diponegoro adalah menggunakan pelayanan melalui dua jalur yaitu jalur reguler dan jalur non reguler. Jalur reguler merupakan jalur bagi warga masyarakat yang mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan pada jenjang SLTP yang disebabkan oleh kemiskinan atau kurangnya kemampuan ekonomi dalam keluarga sehingga mereka tidak mampu untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Pelaksanaan pelayanan pada jalur reguler dengan memberikan materi pelajaran selama tiga tahun dari kelas 1 s/d 3 yang diakhiri dengan ujian akhir. Sedangkan jalur non reguler merupakan jalur bagi warga masyarakat/murid SLTP yang tidak lulus dalam mengikuti ujian nasional pada sekolah formal. Pelaksanaan pelayanan pada jalur

non reguler hanya diberikan pelayanan melalui pembekalan materi terkait dengan soal-soal ujian nasional dan diakhiri dengan mengikuti ujian nasional.

Dalam memberikan pelayanan paket B baik pada jalur reguler maupun non reguler muncul beberapa kendala, antara lain kendala adalah secara internal dan eksternal. Adapun kendala PKBM secara ekstemal adalah: *Pertama*, potensi sarana-prasarana sangat terbatas, sehingga baik tutor maupun warga belajar mengalami kesulitan dalam proses belajar-mengajar, dan akhirnya bermuara pada kualitas hasil belajar yang kurang memadai.

Kedua, pengelola kegiatan belajar paket B hampir semua berlatar belakang pendidikan guru, sebagian besar berpendidikan S-1 , sebagian kecil S2. Namun dalam pelaksanaanya mereka sering menemukan kendala, terutama dengan motivasi warga belajar. Hal ini terjadi karena, di saat pembelajaran metode dan teknik yang digunakan sama dengan pembelajaran pada sekolah-sekolah fomal, dan kurang memahami tentang metode dan teknik proses pembelajaran pada pendidikan nonformal.

Ketiga, perekrutan warga belajar dilakukan dengan beberapa cara secara simultan, yaitu bekerjasama sama dengan aparat desa, guru, dan petugas pendidikan luar sekolah. Dalam pelaksanaanya, sedikit ada paksaan khususnya bagi warga belajar yang menempuh jalur reguler sehingga dalam pelaksanaan pelayanan paket B kurang maksimal. Namun bagi warga belajar yang menempuh jalur non reguler mereka mendaftar atas dasar kesadaran mereka sendiri karena mereka membutuhkan ijazah untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.

Keempat, sistem supervisi yang dilakukan petugas lazimnya hanya melakukan kunjungan ke lokasi pelaksanaan kegiatan. Bentuk-bentuk lain seperti, tes dadakan pada warga belajar,

konferensi kasus, dan angket belum pernah dilakukan oleh petugas. Sedangkan sistem monitoring yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten selama ini dirasakan oleh semua petugas di lapangan sangat terbatas. Kegiatan ini biasanya hanya dilakukan dalam bentuk laporan bulanan dan atau sesekali petugas meninjau ke lokasi kegiatan belajar. Namun tidak melakukan pertemuan-pertemuan secara khusus dengan sesama petugas (pengelola, tutor, penyelenggara) se-kabupaten guna mambahas persoalan-persoalan yang dihadapi dalam mengelola kegiatan belajar.

Kelima, sistem evaluasi yang sering dilakukan hanya evaluasi hasil belajar. Sedangkan evaluasi penyelenggaraan kegiatan tidak dilakukan. Hal ini seperti terkait dengan warga belajar, tutor, fasilitator, penyelenggara, kesesuaian bahan belajar, keefektifan buku modul, buku pelengkap yang digunakan, serta proses belajar pembelajaran. Menurut semua penyelenggara hal ini justru terabaikan, atau dengan kata lain belum pernah diselenggarakan secara terfokus oleh pihak-pihak yang terkait (Depdiknas). Jika ada bentuk evaluasi tersebut hanya bersifat pereferial yang tidak ubahnya seperti pada aktifitas supervisi dan monitoring. Sementara itu sistem pelaporan kegiatan belajar paket B yang selama ini berjalan sering tidak mematuhi jadual dan prosedur yang ditetapkan. Sehingga berdampak pada kebijakan-kebijakan mendatang yang akan ditetapkan.

Adapun kendala PKBM Diponegoro secara internal antara lain sebagai berikut: *Pertama*, seluruh peserta kegiatan belajar paket B berlatar belakang pendidikan SD. Bagi warga belajar yang menempuh jalur reguler, mereka mengikuti kegiatan belajar tersebut karena kondisi ekonomi orangtua miskin sehingga mereka tidak dapat melanjutkan kejenjang berikutnya. Faktor kurangnya ekonomi dalam keluarga dapat menyebabkan kendala

dalam pelaksanaan pelayanan paket B. Hal ini disebabkan warga belajar lebih sering meninggalkan pembelajaran paket B karena mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kedua, waktu belajar ditentukan pengelola, tutor, dan sebagian warga belajar dan kemudian disahkan oleh penilik Dikmas kecamatan, dan secara umum kegiatan belajar dilaksanakan sore hari, namun kegiatan pembelajaran tersebut pada saat kajian ini dilaksanakan tidak berjalan lancar.

Ketiga, materi belajar yang diberikan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan, namun menurut para pengelola, tutor, dan warga belajar, bahwa potensi materi tersebut belum menyentuh kehidupan warga belajar, karena lebih bersifat pengetahuan bukan ketrampilan untuk memecahkan masalah kehidupan warga belajar. Di samping itu, tidak mungkin pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh warga belajar bisa setara dengan kualitas maupun kuantitas jauh rendah dibandingkan SLTP konvensional.

Keempat, tutor sebelum melakukan proses kegiatan belajar, sebagian besar menyatakan telah mempersiapkan dengan baik. Namun pelaksanaannya sering tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan bahkan sebagian menyatakan bahwa kegiatan belajar paket B ini seringkali macet karena warga belajar tidak hadir. Sistem pembelajaran tidak rutin, motivasi belajar rendah, sulit menerima materi.

Berdasarkan catatan dari penulis di atas, ada beberapa saran untuk perbaikan sehingga terlaksananya penangan anak putus sekolah dengan baik. *Pertama*, mengingat bahwa peserta kegiatan belajar berlatar belakang ekonomi sangat lemah, maka hendaknya materi pembelajaran dikaitkan dengan upaya peningkatan ekonomi serta dalam proses pembelajaran selalu

mempertimbangkan kegiatan ekonomi, dalam arti jangan sampai kegiatan belajar mengganggu aktititas ekonomi warga belajar.

Kedua, para tutor dan pengelola secara umum dari guru, dan mereka merasa sulit memotivasi warga belajar untuk belajar, oleh karena itu hendaknya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, petugas tersebut hendaknya diberikan pelatihan-pelatihan lebih dahulu tentang bagaimana melakukan kegiatan pembelajaran pada sistem pendidikan luar sekolah.

Ketiga, mengingat materi belajar yang diberikan belum menyentuh kehidupan masyarakat, maka hendaknya warga bekali berbagai keterampilan guna masalah kehidupan warga belajar. *Keempat*, mengingat bahwa potensi sarana-prasarana sangat terbatas, hendaknya pihak-pihak yang terkait dan yang peduli terhadap kegiatan ini berupaya untuk membantunya, baik dalam bentuk materi maupun gagasan pemecahannya. *Kelima*, mengingat bahwa sistem supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan masih banyak mengandung berbagai kelemahan dan kekurangan dalam prakteknya, maka hendaknya petugas yang terkait berupaya meningkatkan kinerja dalam hal tersebut guna mencapai hasil yang maksimal.

Akhirnya, meskipun terdapat banyak kekurangan dalam banyakhal, penanganan anak putus sekolah melalui penyelenggaraan pelayanan pendidikan paket B tetap patut diapresiasi. Hal ini disebabkan pelayanan pendidikan paket B dapat memenuhi hak belajar warga masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan dengan baik. Mengingat, pendidikan di level formal sudah tidak memungkinkan lagi untuk memenuhi disebabkan faktor usia dan persyaratan formal lainnya. Penulis berharap pelayanan pendidikan Paket B dapat terus ditingkatkan demi terpenuhinya hak-hak pendidikan anak putus sekolah di Indonesia.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Acuhan Proses Pelaksanan Dan Pembelajaran Pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, Jakarta: Direktorat Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, 2006.

Amiroellah, dkk., *Sebab-sebab Putus Sekolah Dikalangan Desa Pantai Di Sulawesi Selatan Suatu Studi Kasus pada Desa Lalang Panua Kab. Barru Selawesi Selatan*, Yogyakarta: UGM.

Aston, Margareth., dan Bowles, Wendy., *Research For Social Worker: An Introction to Methods*, Canberra: Alien and Unwin Pty Ltd, 1988.

Bagong Suyanto, *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan "Kumpulan Hasil Penelitian"*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.

Edi Suharto, *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial Konsep dan Strategi*, Jakarta: Badan Pelatian Dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI.

_____, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung, Refika Aditama, 2005

Ella Yulaelawati dkk. *Acuan Proses Pelaksanaan Dan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Paket B, dan Paket C*, Jakarta; Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional, 2006

Khairuddin, *Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberrty, 2000.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1986.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosda Karya, Cet ke-17, 2004

Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Muhsin Kalida, *Model Jaringan Kemitraan Taman Bacaan Masyarakat*, Yogyakarta: Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, 2009.

Moh. Nazir., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, Semarang: Aneka Ilmu, Anggota IKAPI, 2001

Musa Asy, Arie, *Pembangunan Masyarakat Islam-Agama, Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dalam jumal Populis Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: ElSaq Press, 2003.

Nasir, *Anak Putus Sekolah Dan Cara Pembinaanya Di Kecamatan Jangka Kabupaten Bireun*. Yogyakarta: PSKK UGM, 1999.

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Pajar Hatma Indra Jaya, *Model-model Kesejahteraan Sosial Islam Perpektif Normatif Filosofis dan Praktis*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah Jurusan PMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakana kerjasama dengan IISEP-CIDA.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Petunjuk Teknis Pengusulan dan Pemanfaatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C*, Yogyakarta: Tidak diterbitkan, 2009.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. *Profil Rumah Tangga Fakir-miskin Propinsi Daerah Istimewa*, Yogyakarta: PSKK UGM, 2006.

Roem Topatimasang, dkk, *Merubah Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Sambutan Kepala Diknas Kabupaten Sleman pada acara Sosialisasi Program-program PNF tahun 2009 di Pendopo PKBM Sinar Mlati pada tanggal 14 Februari 2009.

Sudarman Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* , Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Panduan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Suprijanto, *Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: yayasan Penerbitan fakultas UGM, 1980.

Syahruddin, dkk., *Anak Perempuan Umur 7-15 Tahun Yang Tidak Sekolah dan Putus Sekolah Di Sumatra.*, Yogyakarta: PSKK UGM, 1999.

Umberto Sihombing, *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan*, Jakarta: PD Mahkota, 1999.

Wardi Bactiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zainudin Arif, *Androgogi*, Bandung: Angkasa, 1986.

Zulkifli Lessy, *Model-model Kesejahteraan Sosial Islam Perpektif Normatif Filosofis dan Praktis*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Jurusan PMI UPN Sunan Kalijaga Yogyakarta kerjasama dengan IISEP-CIDA.

Makalah

Data Demografi Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta tahun 2007-2008.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PKBM Diponegoro 2008.

Sambutan Kepala Diknas Kabupaten Sleman pada acara Sosialisasi Program-program PNF tahun 2009 di Pendopo PKBM Sinar Mlati pada tanggal 14 Februari 2009.

Internet

http://skripsi-ilmiah.blogspot.com/2009/04/anak-putus-sekolah

http://www.sumardiono.com

BIOGRAFI PENULIS

Siti Solechah, M.Si., lahir di Banjarnegara, 19 Mei 1983. Setelah menamatkan pendidikan di MAN 2 Banjarnegara (1998-2001) melanjutkan pendidikan S1 di Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002-2006). Selanjutnya menempuh pendidikan S2 Konsentrasi Pekerjaan Sosial di kampus yang sama (2007-2009). Sejak 2009 diangkat menjadi dosen tetap di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Aktif melakukan penelitian bidang kesejahteraan sosial baik secara individu maupun kelompok. Beberapa di antaranya, *Model Pendidikan Karakter Komunitas Belajar Qoryah Thayyibah* (2012) (penelitian kelompok), *Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Berbasis Agama Di Gendeng Timur Baciro Gondokusuman Yogyakarta* (2014), *Pemenuhan Hak-hak Anak di TPA Anwar Rosid Baciro Gondokusuman Yogyakarta* (2015), *Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Melalui Penerapan Technology Of Parsipatory Di Kampung Pengok Gondokusuman Demangan Yogyakarta* (2017), *Strategi Perubahan Prilaku Masyarakat Membuang Sampah pada Tempatnya di Dusun Karang Desa Jetis Saptosari Gunungkidul Yogyakarta* (2018) dan penelitian lainnya di bidang kesejahteraan sosial.

Menulis di beberapa jurnal ilmiah mapun buku (kontributor). Beberapa di antaranya, *Peran Sakti Peksos Rumah Singgah Ahmad Dahlan dan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta*, *Jurnal Manhaj*, Vol 2 No. 1 Januari-April 2014; *Pemenuhan Hak-hak Anak di TPA*

Anwar Rosid Baciro Gondokusuman Yogyakarta, Jurnal Manhaj, Vol 2 No. 1 Januari-April 2016; *Model Pendidikan Karakter Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah, Indonesian journal of Educational Research,* Vol 2 No 1 (2017. Sedangkan buku sebagai kontributor antara lain: *Panduan Praktik Pekerjaan Sosial*, (Samudra Biru, 2017); *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial (Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus),* (Samudra Biru, 2012).

PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH

Perspektif Pekerjaan Sosial

Banyak kalangan mengeluhkan tentang kondisi pendidikan di Indonesia, karena memang kondisinya masih memprihatinkan. Akses pendidikan di berbagai daerah masih sangat terbatas, bahkan di daerah-daerah yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan yang memadai seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam buku ini.

Buku *Penanganan Anak Putus Sekolah; Perspektif Pekerjaan Sosial* ini berusaha mengungkap tentang kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan terhadap anak putus sekolah yang dilakukan oleh PKBM Diponegoro di desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY. Di samping itu memuat juga pembahasan tentang pekerjaan sosial, pelayanan pendidikan kesetaraan Paket B, program kegiatan PKBM Diponegoro, dan penanganan anak putus sekolah. Selamat membaca.

SAMUDRA BIRU
Menyebarkan Ilmu Pengetahuan
Pod Samudra Biru
samudrabiru_group
www.samudrabiru.co.id

ISBN 978-623-261-125-2
9 786232 611252